



**“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DI DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017”**

SKRIPSI

*Improving Community Welfare Through Implementation of Stimulant Self-
Supporting Assistance Programs in Sabrang Village Sub-district Ambulu and
Jember District*

Oleh :
SITI ROFIQOH
NPM
1658632012003

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
(STIA) “PEMBANGUNAN” JEMBER
2021**



**“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DI DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017”**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan
mencapai Gelar Administrasi Publik (S.AP)**

Dosen Pembimbing

Asmuni, M.AP

NIDN

0730127904

Oleh :

SITI ROFIQOH

NPM

1658632012003

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

(STIA) “PEMBANGUNAN” JEMBER

2021

MOTTO

“Cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menanamkan budaya literasi”

~Lenang Manggala, Penyair dan Founder GMB-Indonesia~

Sumber : <https://www.goodreads.com/quotes/8701743-cara-terbaik-untuk-meningkatkan-kualitas-karakter-kompetensi-dan-kesejahteraan-hidup>

(diakses 23 Januari 2021)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kepada orang yang selalu mendukung dan mendoakanku, Ayah dan ibu serta keluargaku tercinta.
2. Seluruh guruku yang tak pernah lupa kusebutkan dalam doa.
3. Suamiku tercinta yang selalu mendukung dan mendoakanku setiap waktu.
4. Teman-teman seperjuangan STIA “Pembangunan” Jember terutama angkatan tahun 2016.
5. Almamater kebanggaanku STIA “Pembangunan” Jember.
6. Semua pihak yang telah berkontribusi yang tidak mampu untuk kusebutkan seluruhnya disini.

PERSETUJUAN

“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017”

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
“Pembangunan” pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juni
Tahun : 2021

Dosen Pembimbing,

Asmuni, M. AP
NIDN : 0730127904

Mengesahkan/Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “Pembangunan” Jember

Ibnu Supriyadi, S.H., M.Si.
NIP : 195910241985031001

PENGESAHAN

**“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DI DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017”**

Telah diterima dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “Pembangunan” Jember Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Agustus
Tahun : 2021

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Ibnu Supriyadi, S.H., M.Si.

NIP : 195910241985031001

Anggota

1. Rohim, S.Sos., M.Si

NIDN : 0704078602

2. Sampir Andrean Sukoco, S.I.Kom, M.Si (.....)

NIDN : 0724069003

Asmuni, S.Sos., M.AP

NIDN : 0730127904

Mengesahkan/Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “Pembangunan” Jember

Ibnu Supriyadi, S.H., M.Si.

NIP : 195910241985031001

Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “Pembangunan” Jember

Ir. Hendri Suparto, M.Si.

NUPN : 9990457014

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Rofiqoh

NPM : 1658632012009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul: “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017”, *Improving Community Welfare Through Implementation of Stimulant Self-Supporting Assistance Programs in Sabrang Village Sub-district Ambulu and Jember District*. Merupakan otentitas hasil karya saya, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya plagiat. Saya akan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan,

Siti Rofiqoh

NPM :1658632012003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017”. Skripsi ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “Pembangunan” Jember. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis baik tenaga, ide-ide maupun penilaian, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi. Secara khusus terima kasih tersebut saya sampaikan kepada:

1. Ir. Hendri Suparto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “Pembangunan” Jember yang telah memimpin STIA “Pembangunan” Jember dengan penuh bijaksana.
2. Asmuni, M.AP selaku dosen pembimbing yang telah mendukung dan membimbing penyelesaian pembuatan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Tata Usaha, dan Petugas Perpustakaan STIA “Pembangunan” Jember.
4. Kepala Desa Sabrang yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk menjadikan Desa Sabrang sebagai tempat penelitian.
5. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan seluruhnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, baik dari isi maupun susunannya. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan peneliti selanjutnya.

Jember, 19 Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

Siti Rofiqoh. 1658632012003. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. STIA “Pembangunan” Jember. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017. Asmuni, M.AP. 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan atau Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang. Teori penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model implementasi Jones yang terdiri atas tiga indikator, diantaranya pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang terdiri dari 18 informan yang terbagi menjadi 2 informan kunci 4 informan pendamping dan 14 informan tambahan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan derajat keabsahan menggunakan triangulasi data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program BSPS berjalan cukup baik, pengorganisasian program yang dijalankan sudah sesuai SOP meskipun sebagian dari SOP tidak dapat berjalan secara maksimal. Jika dilakukan penilaian kesuksesan dari program tersebut mungkin memiliki nilai 75%. Karena memang banyak harus dibenahi dan diperbarui dalam implementasi program tersebut. Selanjutnya yang menjadi kendala yaitu kurangnya intensifnya komunikasi antara pelaksana dengan warga penerima bantuan, andai saja sosialisasi tersebut bisa dilakukan secara maksimal warga penerima bantuan akan memahami maksud dan tujuan program dan tidak menimbulkan interpretasi berlebih bagi warga penerima. Dampak Implementasi program tersebut masyarakat memiliki respon yang positif atas terealisasinya program. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap warga penerima bantuan. Program tersebut sangat membantu, meskipun program tidak dapat berjalan secara maksimal paling tidak program tersebut sudah meringankan beban masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal yang lebih baik.

Kata kunci : kesejahteraan masyarakat, BSPS, implementasi kebijakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN MOTTO	II
HALAMAN	III
PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
HALAMAN PERNYATAAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Empiris	9
2.2 Tinjauan Teoritis	11
2.2.1 Kesejahteraan Sosial	11
2.2.2 Kebijakan Publik	13
2.2.3 Implementasi	14
Kebijakan	
2.2.4 Masyarakat Berpenghasilan Rendah	21
2.2.5 Konsep Rumah dan Perumahan	22
2.2.6 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ..	25

2.3	Kerangka Pemikiran	29
BAB III	METODE	
	PENELITIAN	
3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.3	Fokus Penelitian	32
3.4	Teknik Penentuan Informan	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6	Teknik Analisis Data	41
3.7	Teknik Keabsahan Data	42
3.8	Bagan Alur Penelitian	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN	
	PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Objek Penelitian	46
4.1.1	Kondisi Geografis Desa Sabrang	46
4.1.2	Kondisi Demografis Desa Sabrang	47
4.2	Hasil Penelitian	51
4.3	Analisis Temuan Penelitian	74
BAB V	
	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Jumlah Penerima Program BSPS	6
Tabel	2.2	Penelitian Terdahulu	9
Tabel	4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Dusun	47
Tabel	4.4	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sabrang	48
Tabel	4.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Sabrang	49
Tabel	4.6	SDM dalam Organisasi	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	<i>Model Direct and Indirect Impact of ..</i>	20
		<i>Implementation</i>	
Gambar	2.2	Kerangka Pemikiran	30
Gambar	3.3	Bagan Alur Penelitian	44
Gambar	4.4	Diagram Jumlah Penduduk Desa Sabrang	48
Gambar	4.5	Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Program BPS Desa Sabrang	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Penerima Bantuan	82
Lampiran	2	Dokumentasi Wawancara	84
Lampiran	3	Surat Ijin	88
		Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Rumah adalah sesuatu yang fundamental dan sangat perlu untuk semua orang. Rumah mempunyai peranan penting untuk wadah berteduh, disisi lain rumah harus menjadi tempat berlindung yang sejuk nan damai atau dengan kata lain layak untuk dihuni. Rumah yang layak huni yaitu rumah yang memiliki parameter sesuai ketentuan layak huni diantaranya yakni rumah yang bersih dan sehat. Resistansi hidup masyarakat dapat terlaksana jika rumah layak huni tersebut dapat dimilikinya oleh masyarakat.

Faktanya bukan persoalan yang gampang guna merealisasikan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan perkara gampang. Ketidaksanggupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal ini menjadikan salah satu parameter dalam penentu kemiskinan yaitu kondisi rumah yang tidak layak huni. Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada bagian ketentuan umum pasal 1 (mengenai kesejahteraan) , pasal 2 (Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), pasal 9 (Perlindungan Sosial), dan pasal 11 (Jaminan Sosial), merupakan landasan atau dasar hukum yang sudah disepakati bersama, menjelaskan bahwa suatu Negara selaku pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bertanggung jawab penuh untuk memberikan dan mewujudkan hak kehidupan dengan cara meningkatkan taraf kesejahteraan setiap warga negaranya. Dengan adanya jaminan dan perlindungan sosial merupakan bentuk nyata usaha suatu Negara dalam memberikan rasa aman, menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya yang layak , mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan

kerentangan sosial untuk setiap warga negara melanjutkan hidupnya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan setidaknya untuk mencapai taraf sejahtera ialah meliputi aspek fisik berupa bangunan dan infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi masyarakat, jaminan sosial, rekreasional, pekerja sosial dan PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Adi, 2013:5).

Berdasarkan agenda taktis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2014-2018. Kabupaten Jember mempunyai persoalan pembangunan yang secara global tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2014-2018. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Masih minimnya tingkat pendidikan masyarakat.
2. Belum meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada masyarakat.
3. Masih mahalnya pelayanan kesehatan bagi sejumlah masyarakat.
4. Belum terjangkau rumah layak huni bagi sebagian masyarakat.
5. Kualitas jalan dan jaringan yang belum memadai.
6. Belum terstrukturnya lingkungan dengan maksimal.
7. Kurang maksimalnya Pelayanan publik bagi masyarakat.

Beberapa parameter kesejahteraan masyarakat adalah dengan menduduki rumah layak huni. Akan tetapi Kabupaten Jember masih mempunyai persoalan mengenai perumahan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang telah dituangkan tersebut adalah perumahan layak huni yang masih sedikit terhadap beberapa masyarakat. Guna menyelesaikan persoalan itu diperlukan rencana, kebijakan dan agenda pembangunan yang lebih tepat, terukur lewat pendekatan strategi yang menyeluruh dan dimulai dengan mengenali persoalan yang ada, sehingga dapat ditemukan tindakan-tindakan solutif lewat strategi dan kebijakan serta agenda pembangunan.

Bagi masyarakat yang tergolong miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat tinggal semata tanpa melihat dan memperhatikan kondisi kelayakannya dalam segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan masyarakat yang tergolong

miskin dalam menjangkau serta memenuhi kebutuhan rumah layak huni disebabkan oleh minimnya pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Dari hal tersebut, dikhawatirkan nantinya akan menyebabkan adanya ketidakberfungsian sosial sampai dengan keterlantaran individu sebagai anggota keluarga yang ada didalamnya. Rumah memiliki fungsi yang lebih luas bagi setiap individu atau manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dengan memiliki rumah, secara fisik akan memberikan manfaat terlindunginya individu tersebut dari kondisi cuaca alam seperti panas matahari, hujan, dan serangan hewan yang mengancam nyawa. Kemudian secara mental terpenuhinya kebutuhan rumah akan mengakibatkan individu atau keluarga dapat memberikan rasa nyaman, bisa sebagai sarana beristirahat, dan lebih terfokus dalam melakukan pekerjaan diluar rumah. Sedangkan untuk fungsi sosial rumah menjadi sarana sebagai proses pembinaan keluarga dalam segi jasmani, rohani, pemberian nilai sosial dan pembentukan karakter setiap anggota dalam keluarga. (Wanda, 2017:3).

Dalam hal ini, memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H hasil amandemen ke IV, menjelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dari penjelasan tersebut bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan mengembangkan diri, terlebih memiliki rumah yang baik, sehat, dan layak huni, karna rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan taraf hidup, harkat, martabat, dan mutu kehidupan suatu bangsa dan negara. (Wanda, 2017:4).

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan stimulan supaya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menempati rumah layak huni. Tujuan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini guna berkontribusi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mempunyai rumah yang layak huni. Selain itu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga bertujuan meningkatkan taraf hidup

masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat sehingga manfaat bantuan tersebut dapat dirasakan dalam jangka yang panjang.

Adanya program BSPS merupakan rangkaian dari kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat. Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sejak tahun 2009 sampai 2012. Pada tahun 2010 Kementerian Perumahan Rakyat telah meluncurkan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dengan pendekatan Tridaya (manusia, lingkungan, ekonomi), kesesuaian dengan tata ruang, penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), dan keterpaduan dengan sektor lain. Kegiatan ini didukung dengan kegiatan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa penyediaan stimulan peningkatan kualitas (PK) dan pembangunan baru (PB) bagi rumah tangga kumuh, kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dan disediakan skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berpedoman pada materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pada dasarnya keterlibatan masyarakat tidak hanya pada upaya pemenuhan rumah secara fisik tetapi juga meliputi keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Perumahan swadaya tidak lagi diartikan secara sempit ketika keterlibatan mereka hanya pada saat membangun rumah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, secara eksplisit dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan

stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Sedangkan Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran atau perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Lingkup BSPS terdiri dari pembangunan rumah baru (PB) dan peningkatan kualitas rumah (PK) serta pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Tujuan dari program BSPS adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Penulis mencoba melakukan observasi di sejumlah Desa yang terdapat di Kecamatan Ambulu yang telah menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sesuai dengan data pada saat observasi yang dilakukan pada tiga desa yang berada di Kecamatan Ambulu, ada satu Desa yang dimana terdapat satu dusun tidak dapat menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu Desa Sabrang. Salah satu alasan dusun tersebut tidak dapat menerima program karena tanah yang disinggahi oleh warga satu dusun tersebut bukan milik hak pribadi, melainkan tanah milik perhutani. Sedangkan syarat untuk menerima program tersebut, tanah harus harus milik pribadi sehingga satu dusun di Desa Sabrang tersebut tidak dapat menerima program bantuan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi maka penulis memilih Desa Sabrang untuk tempat penelitian, dan untuk program BSPS tersebut paling akhir di realisasikan di Desa Sabrang yaitu pada tahun 2017. Nantinya penulis akan meneliti bagaimana implementasi, kendala serta dampak adanya program BSPS. Karenanya penulis akan mengawali dengan jumlah data penerima untuk dapat membahas lebih lanjut program yang akan dilakukan penelitian.

Berdasarkan data yang diperoleh, usulan program ini sejumlah 150 calon penerima program. Kemudian dari semua usulan sejumlah 150 orang disetujui $\frac{1}{3}$ dari jumlah usulan, agar lebih jelas data tersebut akan disajikan dalam bentuk

tabel, dengan klasifikasi berdasarkan Dusun yang berada di Desa Sabrang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Program BSPS Berdasarkan Klasifikasi Dusun

No.	Dusun	Jumlah Penerima
1.	Krajan	16
2.	Kebonsari	10
3.	Ungkalan	-
4.	Tegalrejo	14
5.	Jatirejo	10
Jumlah		50

Sumber : LPM Desa Sabrang 2020

Dari hasil tabel diatas tertulis penerima program berjumlah 50 penerima. Dari kelima Dusun yang berada di Desa Sabrang terdapat 1 dusun yang tidak dapat mendapatkan implementasi dari program ini, dikarenakan tanah yang ditempati Dusun tersebut status kepemilikan bukanlah milik sendiri melainkan Perhutani sehingga tidak dapat mendapatkan alokasi dalam program ini.

Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang memiliki ketentuan mengenai keselamatan bangunan dan minimal batasan bangunan. Program BPSB merupakan bantuan Stimulan berwujud uang guna pembelian bahan bangunan untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dari Pemerintah Daerah kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak berkesinambungan dan terpilih dan bertujuan guna mengayomi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Perumusan suatu kebijakan hingga pada tahap pelaksanaan operasionalnya yang berbentuk program, proyek, ataupun kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan atau sasaran khusus yang ingin dicapai. Hal demikian dilakukan guna melihat kesesuaian kebijakan atau program itu sendiri sudah sesuai dengan tujuan, dapat memecahkan masalah, serta dapat memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat ataupun sebaliknya. Pada tahap pelaksanaan kebijakan melalui program yang diberikan dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan pengkajian dan analisis masalah yang hadir di lapangan secara berkelanjutan sebagai proses ilmiah dari terciptanya suatu kebijakan ataupun program itu sendiri. Pendekatan

dalam dimensi pemberdayaan, penguatan peran pendampingan sosial, serta pemahaman dan pemaknaan mendalam tentang unsur partisipatif, merupakan pendekatan teori yang bisa digunakan untuk melihat lebih dalam terhadap hasil (*output*) program itu sendiri. Dari berbagai penjelasan tersebut peneliti penting sekali untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017 ?

Berdasarkan uraian tersebut penulis terpacu melaksanakan penelitian dengan judul : “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017 “.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berusaha mengidentifikasi dan menganalisis masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017?
2. Bagaimana Kendala dan pelaksanaan dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ?
3. Bagaimana Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Desa Sabrang ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

Sesuai rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan yang akan dicapai atas penelitian ini yaitu mendapatkan data dan informasi yang sah guna menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor kendala dan pendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
3. Mendeskripsikan dan menganalisis ungkapan masyarakat atas dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap mahasiswa guna menambah khasanah keilmuannya dan bagi instansi dapat sebagai saran dan kritik serta dapat berkontribusi untuk tambahan referensi atau bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu menjadi referensi oleh penulis dalam menjalankan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berikut disajikan tabel beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Tempat Penelitian	Hasil
Afifa Qomaria (2015)	Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto	Kualitatif	Kelurahan Meri Kota Mojokerto	Hasil penelitian menunjukkan Program BSPS memberikan perubahan dan dampak yang cukup baik. Program BSPS meningkatkan kualitas tempat tinggal warga dan meningkatkan kesejahteraan.
Tuwis Hariyani (2016)	Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kualitatif	-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BSPS ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ahmad Nawi, Asih Widi Lestari	Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah	Kualitatif	Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak

Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Tempat Penelitian	Hasil
(2018)	Tidak Layak			

Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Tempat Penelitian	Hasil
	Huni terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu			huni ini, dilihat dari <i>efisiensi</i> pelaksanaan sudah baik. Bahwa bantuan pemerintah ini diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam <i>indikator responsivitas</i> sudah sangat baik tanggapan masyarakat dengan adanya program bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban tanggungan masyarakat. Serta sasaran dalam program tersebut merupakan masyarakat yang benar-benar kurang mampu di desa sumbergondo.

Sumber : Jurnal Ilmiah 2020

Persamaan

1. Penelitian pertama memiliki persamaan pada variabel pengaruh sosial dan BSPS serta pada Analisis data.
2. Penelitian kedua memiliki persamaan pada variabel pengaruh sosial dan BSPS.
3. Penelitian ketiga memiliki persamaan pada variabel pengaruh sosial dan BSPS serta pada Analisis data.

Perbedaan

1. Penelitian pertama memiliki perbedaan pada tempat penelitian.

2. Penelitian kedua memiliki perbedaan pada tempat penelitian dan Analisis data.

3. Penelitian ketiga memiliki perbedaan pada tempat penelitian

Sesuai dengan persamaan dan perbedaan dari ketiga peneliti terdahulu menguatkan peneliti untuk mengkaji Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017.

2.2.Tinjauan Teoritis

Penelitian ini terdiri dari variabel Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Konsep Rumah dan Perumahan, dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2.2.1. Kesejahteraan Sosial

Menurut dasar kata atau asal-usulnya, kesejahteraan bermula dari kata “sejahtera” yang memiliki definisi atas bahasa Sanskerta “*cetera*” yang memiliki arti “payung”. Berdasarkan definisi kata tersebut kesejahteraan yang dimaksud dalam “*cetera*” yaitu orang yang sejahtera, orang yang di masa hidupnya lolos atas kebodohan, kemiskinan, kekhawatiran, dan ketakutan yang kelak hidupnya akan sejahtera nan damai. Kesejahteraan sosial merupakan metode yang terukur berdasarkan pelayanan sosial serta instansi yang diprogram guna mendukung masyarakat untuk memenuhi kriteria kehidupannya. (Kahn dalam Fahrudin, 2014:23).

Kesejahteraan yang berarti pengkajian mengenai perencanaan, regulasi dan petugas instansi yang memfokuskan pada implementasi layanan sosial terhadap masyarakat. Selain itu kesejahteraan sosial memiliki peranan penting pada disiplin akademik. (Fahrudin, 2014:10).

Dimana kesejahteraan sosial memiliki tujuan :

1. Guna menggapai kehidupan yang sejahtera demi terciptanya kriteria pokok kehidupan misalnya pangan, sandang, perumahan, kesehatan serta hubungan masyarakat yang rukun pada alam sekitar.
2. Guna terciptanya suatu adaptasi yang baik pada masyarakat serta pada alam sekitarnya. Seperti menganalisis serta meninjau metode dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan pokok dari kesejahteraan sosial yaitu terciptanya keadaan sejahtera yang bisa diperkirakan pada tercapainya suatu kebutuhan pokok masyarakat misalnya pangan, sandang, dan perumahan yang menjadi parameter minimum kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan adaptasi atas lingkungannya. Kesejahteraan sosial juga bertujuan untuk meredakan dan melenyapkan tekanan-tekanan yang diakibatkan perubahan sosial ekonomi, dan menjauhi dampak negatif supaya dapat mencapai keadaan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Friedlander dan Ape dalam Fahrudin, 2014:12).

Definisi kesejahteraan yang tertuang dalam UUD 1945, pada bagian pembukaan dan Bab XIV serta pada UU No. 11/2009 memiliki persamaan secara internasional dengan konsep kesejahteraan menurut Jones (1990), yang berbunyi *“the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations”*. *Social welfare* yang bisa berarti sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum ataupun kesejahteraan sosial. Kesejahteraan adalah gagasan abstrak yang keberadaannya bersangkutan langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dipercayai oleh seseorang. Kesejahteraan bukan hanya diartikan sebagai ukuran kesiapan entitas, namun perlu disangkut-pautkan dengan pandangan hidup bangsa yang dipercayai. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, akan tetapi juga menjadi tujuan sekumpulan individu yang tergabung pada suatu negara sehingga timbul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, sedangkan kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Istilah “kesejahteraan umum” yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 memiliki arti yang setara dengan “kesejahteraan sosial” yang tertuang pada Bab XIV UUD 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yakni keadaan tercapainya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara supaya bisa hidup dengan layak serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan peranan sosialnya. (Fahrudin, 2014:10).

2.2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan piranti teknis dan logis guna menuntaskan persoalan. (Shore dan Wright dalam Marzali 2012:20). Disisi lain Kebijakan yaitu asas-asas yang mengelompokkan langkah-langkah untuk mengarahkan menuju cita-cita. (Titmuss dalam Suharto 2012:7). Selain itu Kebijakan merupakan suatu ketentuan guna menjalankan atau tidaknya sesuatu, kebijakan publik secara global adalah langkah-langkah bersama guna menyelesaikan persoalan sosial. Akan tetapi kebijakan dapat diartikan atas ketentuan bahwa persoalan sosial akan bisa diselesaikan dengan konsep kebijakan yang telah dibuat oleh karena itu tidak membutuhkan langkah-langkah tertentu.

Melihat dengan menyelesaikan, meredakan dan bahkan menangkal berlangsungnya suatu persoalan dibutuhkan sebuah regulasi yang dirumuskan dengan memiliki tujuan dan target, dimana guna menggapai tujuan dan target atas regulasi sudah pasti dibutuhkan sebuah pelaksanaan dari regulasi tersebut yang merupakan tindak lanjut dari tahap perumusan regulasi. Dengan demikian, kebijakan publik, pernyataan mengenai tujuan, target dan sarana diartikan ke dalam agenda yang ditujukan menggapai cita-cita yang tercantum dalam kebijakan.

Sesungguhnya sejumlah agenda dapat dikembangkan guna merespon tujuan kebijakan yang sama, dan mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang dapat didefinisikan sebagai akibat atas sebuah

program. Dalam rangka tercapainya keserasian antara tujuan dan target kebijakan dengan realita di lapangan, (Fahmi dalam Amini, 2019:18) mengutarakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang bisa memunculkan kegagalan dalam implementasi atau kebijaksanaan, yaitu :

1. Isi Kebijaksanaan

Kebijaksanaan disebut gagal dikarenakan terdapat persamaan tujuan dan kebijaksanaan, tidak mempunyai kepastian baik internal dan eksternal dari kebijaksanaan itu sendiri.

2. Sosialisasi

Minimnya informasi, sehingga akan berdampak pada visualisasi yang kurang tepat, baik terhadap objek kebijaksanaan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijaksanaan yang hendak dilakukan dan hasil-hasil dari kebijaksanaan tersebut.

3. Dukungan

Tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak maka akan sulit kebijaksanaan tersebut untuk dilaksanakan.

4. Pembagian Potensi

Pada kondisi ini yaitu bagaimana pemisahan wewenang dan tugas untuk para aktor dengan organisasi pelaksana. Tahap implementasi tidak diawali disaat target dan tujuan ditentukan oleh ketetapan kebijakan sebelumnya, tahap implementasi baru terbentuk sesudah proses pendistribusian sumber daya dan biaya yang telah disetujui. Analisis implementasi program lebih ditekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan ketidaksiuksesan perolehan target kebijaksanaan.

2.2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari aktivitas pengorganisasian interpretasi dan aplikasi. (Jones dalam Nirwanasari, 2020:22). Berdasarkan implementasi kebijakan Jones tersebut dapat dijabarkan 3 macam aktivitasnya, yaitu:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur organisasi kebijakan yang jelas sangat diperlukan dalam menjalankan program sehingga para tenaga pelaksana dapat tersusun dari sumber daya manusia yang kompeten atau ahli dan berkualitas, metode yang digunakan agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak yang baik. Dalam hal ini, program harus memiliki struktur organisasi atau birokrasi yang jelas serta teratur. Indikatornya yaitu:

- a) Struktur Organisasi pelaksana, kesesuaian pekerjaan yang dilakukan, serta tugas pokok dan fungsinya.
- b) Sumber daya manusia dalam organisasi.
- c) Perlengkapan, alat kerja, sarana dan prasarana, serta biaya operasional.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi atau inti suatu kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaksana dan sasaran kebijakan. Para pelaksana harus benar-benar mampu dan bisa menjalankan program kebijakan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan-tujuan yang diharapkan mampu tercapai. Dalam hal ini, program kebijakan harus memiliki petunjuk teknis dan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman oleh pelaksana program. Agar program dan tujuannya dapat tercapai dengan optimal. Indikatornya yaitu:

- a) Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat.
- b) Kesesuaian pelaksanaan dan peraturan.
- c) Kesesuaian petunjuk pelaksanaan dengan petunjuk teknis.

3. Penerapan atau Aplikasi

Penerapan atau aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin. Dalam penerapan atau aplikasi harus ada prosedur kerja yang jelas sehingga program bisa berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan dan tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat diperlukan dalam perealisasi program, prosedur kerja program yang jelas bisa membantu pelaksana program kebijakan menjalankan tugasnya mengelola suatu pekerjaan, yang mengandung makna tentang apa, untuk apa, dan bagaimana. pekerjaan harus diselesaikan. (Megga dalam Nirwanasari, 2020:23). Adapun indikator penerapan supaya dapat tercapai secara optimal.

- a) Prosedur kerja dan kejelasan SOP.
- b) Program kerja dan kejelasan program kerja.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka model implementasi kebijakan merupakan apa saja yang ada dan berperan dalam pengimplementasian program, baik berupa organisasi, sumber daya, kondisi, sikap pelaksana dan lainnya yang akan mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Implementasi fungsi-fungsi tersebut bisa digunakan untuk menilai apakah tugas utama pelaksana instansi tersebut sudah berlangsung dengan baik atau belum. Setelah itu fungsi dapat digunakan untuk menilai persoalan yang ada, sehingga dapat memperlambat berlangsungnya pelaksanaan suatu kebijakan.

Ketika generasi awal, implementasi kebijakan hampir searah dengan pengkajian pengambilan keputusan di sektor publik. Pengkajian awal, mayoritas implementasi hanya berbentuk tulisan-tulisan, walupun cukup detil, terkait seperti apa suatu keputusan otoritatif dijalankan. Pengkajian awal ini dilaksanakan oleh Martha Derthick di tahun 1972 yang menyatakan bahwa program-program publik yang dipromotori oleh pemerintah jarang yang berhasil mencapai tujuan (Abdul Wahab, 2012:161).

Metter dan Horn dalam Winarno (2016:135) membatasi implementasi kebijakan sebagai sebuah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang (atau kelompok-kelompok) baik swasta ataupun pemerintah yang ditujukan untuk

berhasil menggapai cita-cita yang telah diputuskan dalam ketentuan-ketentuan kebijakan sebelumnya. Yang terbagi dalam enam aspek diantaranya :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Aspek ini berlandaskan atas kepentingan utama terhadap elemen-elemen yang menunjukkan kinerja. Menurut Van Meter dan Van Horn, mengkaji parameter kinerja adalah tahap yang kritis dalam analisis implementasi kebijakan. Parameter kinerja ini mengukur sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang sudah dilaksanakan. Dalam menjalankan pengkajian implementasi, tujuan-tujuan dan target sebuah program yang hendak dilakukan harus dinilai dan dihitung karena apabila tujuan-tujuan tersebut tidak dipertimbangkan maka pelaksanaan kebijakan tersebut sulit untuk sukses atau mengalami kegagalan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Selain ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, sumber-sumber yang tersediapun harus diperhatikan. Sumber-sumber tersebut meliputi anggaran atau stimulus (*incentive*) lain yang mendesak dan mempelancar pelaksanaan secara efektif. Dalam implementasi kebijakan, sering kali terdengar para implementor ataupun pejabat mengungkapkan bahwa kita tidak memiliki cukup anggaran untuk mendanai program-program yang sudah direncanakan. Dengan demikian, dalam sejumlah kasus, kecil besarnya anggaran dapat menjadi aspek yang menentukan kesuksesan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Apabila perencanaan dan tujuan-tujuan dimengerti oleh para implementor dan mereka mau untuk beratnggunjawab, maka implementasi akan berjalan efektif. Dengan begitu kejelasan perencanaan dan tujuan-tujuan implementasi sangat penting guna memberi perhatian yang besar guna, ketepatan komunikasi oleh para implementor, serta konsistensi atau keserasian dari perencanaan dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan sejumlah sumber informasi. Perencanaan dan tujuan-tujuan tidak dapat dijalankan kecuali jika perencanaan dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para implementor bisa mengerti apa yang diharapkan dari perencanaan dan tujuan-tujuan tersebut.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur organisasi. Struktur organisasi yang diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

5. Kecenderungan pelaksana (*implementors*)

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan tersebut.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh van meter dan van horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut van meter dan van horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Menurut Van Meter dan van Horn ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni : tujuan-tujuan kebijakan yang

telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai masing-masing personal pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect impact on Implementation. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*).
2. Sumber Daya (*Resources*).
3. Disposisi (*Disposition*).
4. Struktur Birokrasi (*Bureauratice Structure*). (Edwards III dalam Rizki, 2019:16)

Faktor-Faktor implementasi kebijakan di atas maka peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi (*Communication*)

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif yaitu mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan informasi, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan

fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh keinginan para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan.

3. Disposisi (*Disposition*)

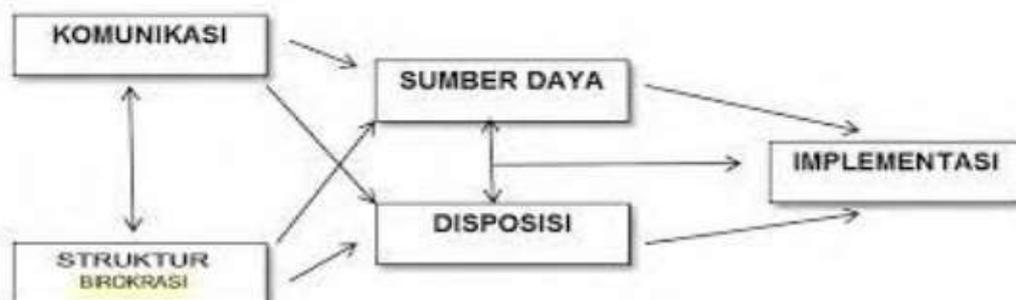
Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti memiliki kejujuran, mempunyai komitmen, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

4. Komunikasi (*Communication*)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam Organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi

sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan Edward III digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 *Model Direct and Indirect Impact of Implementation*, Sumber : (Edward dalam Rizki, 2019:20).

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersedia dan pelaksanaan implementasi kebijakan.

2.2.4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terdapat kekurangan perihal yang biasa untuk dimiliki yang sering disebut dengan istilah pangan, sandang, dan papan, perihal tersebut sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup. Mereka disebut berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatannya tidak cukup guna memenuhi kebutuhan pokok, yakni pangan, sandang, dan papan. (Anwar dan Adang, 2013:260).

Dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat acapkali beberengan dengan tumbuhnya sejumlah nilai dan norma sosial yang baru, dan bisa berdampak pada pergeseran ukuran-ukuran taraf kehidupan tertentu, yang kemudian menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat. Ukuran kaya atau miskin dapat dilihat melalui kemampuan atau jumlah kepemilikan nilai-nilai ekonomisnya.

Kebutuhan pokok bisa diartikan dalam suatu paket barang dan jasa yang dibutuhkan setiap orang guna dapat hidup secara manusiawi yang terdiri atas

komposisi pangan bergizi cukup, kebutuhan air higienis, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan yang paling pokok yaitu tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas-batas minimum pendapatan guna memenuhi kebutuhan pokok biasanya dipengaruhi oleh :

1. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
2. Posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya.
3. Kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi

Emil dalam Syani (2012) berpendapat bahwa untuk memperbaiki nasib mereka mesti ada campur tangan dan penyertaan aktif membantu mereka keluar dari bawah garis kemiskinan tanpa bantuan pemerintah, maka mereka akan semakin tidak mampu merebut bagian yang lebih layak dari pendapatan nasional bagaimana tidak demikian, betapa banyak rakyat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan itu belum lagi mau meningkatkan pendapatan, baru akan mulai saja sudah tersandung dengan harga yang lebih cepat melambung tinggi.

Secara garis besar kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga dimensi yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial, dan kemiskinan politik. Ketiga dimensi kemiskinan ini walaupun secara teoritis dapat dibedakan namun dalam kenyataannya satu sama lain saling mempengaruhi. Kemiskinan secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu masih adanya kekurangan di bidang materi pada sejumlah golongan orang atau masyarakat. Batas kemiskinan pada masing-masing daerah berbeda-beda karena didasarkan pada lokasi yang berbeda dan standar kebutuhan hidup masing-masing daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) membatasi yang dikatakan miskin dari segi besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa.

Adapun yang menjadi tujuan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf

kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi oleh karena itu yang menjadi sasaran program ini adalah keluarga atau rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin yang ada di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Adapun ukuran atau kriteria untuk ukuran sederhana layak huni yang dibangun yaitu rumah yang dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

2.2.5. Konsep Rumah dan Perumahan

Rumah merupakan salah satu jenis kebutuhan jasmani atau kebutuhan yang bersifat material yang memerlukan pemenuhan, karena merupakan salah satu aspek kesejahteraan sosial (Suhendi, Mochammad, 2012:2). Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pemibinaan keluarga. Rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu rumah juga tempat bermukimnya manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk bermasyarakat (Trikomara dalam Wanda, 2017:29). Selain itu berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman menjelaskan bahwa :

- 1) Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
- 2) Perumahan adalah kumpulan rumah rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 3) Kawasan Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

- 4) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan pemukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan pemukiman.
- 5) Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
- 6) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
- 7) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 8) Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- 9) Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- 10) Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 11) Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- 12) Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri.

Dari penjelasan tersebut, rumah seringkali hanya dianggap sebagai bangunan material atau fisik yang diperlukan hanya sebagai tempat tinggal setiap keluarga. Tetapi selain itu, fungsi sesungguhnya dari rumah itu sendiri sangatlah luas, tidak sedikit dari masyarakat belum menyadari hal tersebut. Rumah tidak hanya sebagai bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari kondisi luar rumah seperti kondisi alam adanya panas, hujan, angin, dan gangguan keamanan lainnya, melainkan selain itu rumah dalam hal ini merupakan sarana

yang sangat diperlukan untuk suatu proses reproduksi sekaligus pembinaan dan pelembagaan nilai dan norma sosial, pengembangan proses interaksi, memberikan rasa damai, nyaman, tentram, dan meningkatkan harkat dan martabat bagi setiap anggota keluarga yang ada didalamnya. Jika fungsi rumah dilihat dari sisi tersebut maka pemenuhan rumah selain sebagai kebutuhan jasmani berupa bangunan material atau fisik, rumah juga memberikan fungsi sosial lainnya terhadap setiap anggota keluarga yang ada didalamnya. Sehingga, jika penyediaan sarana rumah atau perumahan yang layak ini terpenuhi maka akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya, menciptakan keluaran individu yang bisa secara mandiri membentuk lingkungan sosial yang lebih baik.

2.2.6. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan suatu masalah yang tidak pernah terselesaikan. Walaupun telah berbagai program telah dibuat oleh pemerintah namun masih belum terselesaikan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Perumahan, Rumah adalah Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah sangat berfungsi penting bagi setiap individu maupun keluarga. Jadi dalam mewujudkan rumah yang sesuai dengan fungsinya tersebut perlu adanya dorongan dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dimana dalam Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Dilihat dari peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan

Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya merupakan salah satu program Bantuan Sosial Pemerintah Pusat di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemberian bantuan dana yang bersifat material bangunan.

Bantuan stimulasi adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran atau perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Seiring dengan melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadayanya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Yang menjadi Latar Belakang terbentuknya dan munculnya Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Terkait dengan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan yang ditunjukkan melalui pemberian kemudahan pembangunan dalam bentuk stimulan rumah swadaya. Bentuk bantuan ini dimaksudkan untuk membangkitkan keswadayaan masyarakat dalam melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah secara mandiri. Adapun maksud dan tujuan dari program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) adalah :

- 1) Maksud Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman yang dilaksanakan dengan cara :
 - a. Mewujudkan kegiatan berbasis komunitas.
 - b. Mendampingi dan memberdayakan dalam rangka peningkatan kapasitas keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
 - c. Mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.
- 2) Tujuan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah :
 - a. Menyediakan instrumen penyelenggaraan perumahan swadaya yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan lingkungannya secara swadaya.
 - b. Menyediakan program dan kegiatan yang dapat membantu mendorong, memfasilitasi dan mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilakukan secara swadaya.
 - c. Mempercepat tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertib aman dan nyaman dengan cara terjangkau.

Adapun Sasaran fungsional kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah terselenggaranya pemberian dukungan, dorongan, fasilitasi bagi pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya secara tertib, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan. Adapun Sasaran operasional kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah :

- 1) Meningkatnya kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat dalam rangka pembangunan perumahan swadaya.
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman.
- 3) Meningkatnya jumlah rumah layak huni dengan cara yang terjangkau, bagi MBR yang membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang

Infrastruktur, pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Pendapatan Masyarakat Miskin

Batas garis kemiskinan itu, bisa naik bisa turun dan dipenuhi oleh berbagai faktor yakni angka inflasi dan harga kebutuhan dasar.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

c. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

Adapun tugas dan tanggung jawab Koordinator Kabupaten atau Kota dalam Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya yang dianggap sebagai Asisten Ahli Manajemen Konsultan Manajemen Wilayah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab Konsultan Manajemen Wilayah di Kabupaten atau Kota meliputi:

1. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator.
2. Mengendalikan pelaksanaan pendampingan BSPS.
3. Mengendalikan pengusulan proposal dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).
4. Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari fasilitator kepada Pejabat Pembuat komitmen melalui Konsultan Manajemen wilayah.
5. Mengelola sistem informasi manajemen BPS tingkat Kabupaten atau Kota.
6. Menindak lanjuti temuan dan pengaduan masyarakat serta melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya koordinator Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan tim teknis. Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Desa atau Lurah dalam BSPS. Selain menjadi anggota tim teknis Kabupaten atau Kota, Kepala Desa atau Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melakukan sosialisasi BSPS kepada masyarakat.
- 2) Mengesahkan hasil pendataan calon penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya dan menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota.
- 3) Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh calon KPB bukti kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan yang tidak tetap.
- 4) Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Menetapkan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Cara Penarikan dana oleh penerima bantuan terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Memperlihatkan KTP asli penerima bantuan.
- b) Memperlihatkan daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang ke Kantor Layanan Bank atau Pos Penyalur.
- c) Penarikan dana dilakukan dalam dua tahap masing-masing sebesar 50% yang ditunjukkan dengan DRPB2 yang selanjutnya ditransfer langsung ke rekening toko atau penyedia bahan bangunan.
- d) Penerima bantuan menandatangani slip penarikan dan setoran (transfer) ke rekening toko atau penyedia bahan bangunan.
- e) Penerima bantuan dapat menarik dana BSPS dalam bentuk uang apabila penerima bantuan adalah jompo, cacat permanen, atau janda tua yang tinggal sendiri, untuk pembayaran ongkos tukang (paling tinggi 15% terhadap total bantuan).
- f) Buku Tabungan harus selalu dibawa setiap melakukan penarikan.
- g) Dalam hal terjadi perbedaan nama dan nomor KTP yang tercantum dalam SK penetapan penerima bantuan karena kesalahan pengetikan maka data

yang dipedomani adalah sesuai data yang tercantum dalam KTP asli dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.

- h) Dalam hal penerima bantuan berhalangan tetap sehingga tidak dapat menarik dana BSPS di kantor layanan Bank atau Pos Penyalur, maka dapat memberikan kuasa kepada suami atau istri atau ahli waris yang tinggal serumah yang akan diperbaiki (dalam satu KK), yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau kelurahan atau kepala desa dan membawa KTP asli penerima bantuan.
- i) Dalam hal lokasi penerima bantuan dengan kantor layanan Bank atau Pos Penyalur jauh dan memerlukan biaya tinggi, maka Bank atau Pos Penyalur harus mendatangi Desa tempat penerima bantuan.

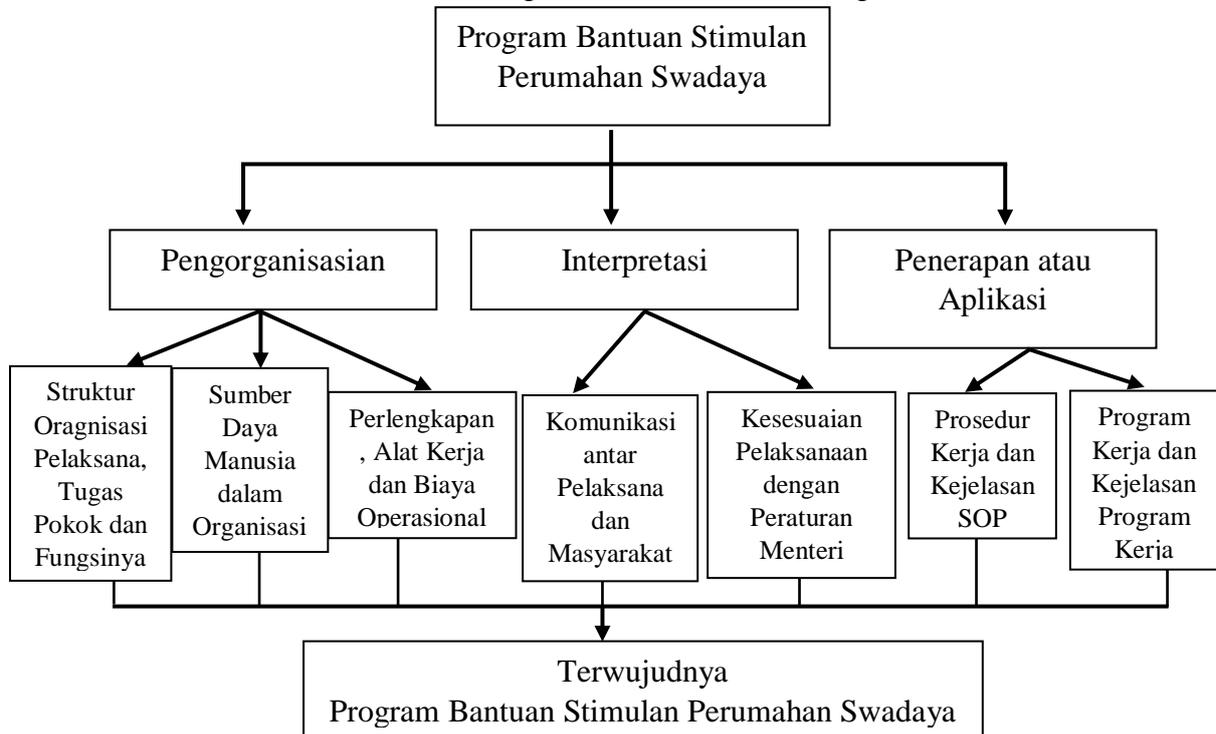
2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2012). Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya.

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan kemiskinan yang membuat masyarakat mempunyai rumah yang tidak layak huni. Penyebab kemiskinan terjadi yaitu karena sumber mata pencaharian yang dimiliki masyarakat tidak ada yang cukup menjanjikan. Sumber mata pencaharian rata-rata masyarakat yang adalah pada bidang pertanian yang hasilnya juga masih tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

Oleh Karena itu Pemerintah melaksanakan kebijakan untuk menangani permasalahan rumah tidak layak huni tersebut. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini merupakan program untuk meningkatkan prakarsa (MBR) dalam membangun atau dalam rangka peningkatan kualitas rumah beserta prasarana dan sarana serta utilitas (daya guna).

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan perpaduan dari teori Charles O. Jones dan George C. Edward adalah sebagai berikut :



Gambar

2.2

Kerangka

Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan kebenaran maupun permasalahan yang muncul dari fakta ataupun fenomena yang terjadi. Metode penelitian merupakan suatu cara, jalan, atau petunjuk teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis (Kaelan, 2012:7). Dengan metode, peneliti dapat menyusun secara sistematis kemudian dapat digunakan untuk menggali dan mengetahui sumber permasalahan yang terjadi. Dengan begitu adanya metode penelitian ini dapat mempermudah peneliti guna menjawab dan memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan manfaat penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

Pendekatan metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dibanding *generalisasi*, menggunakan data langsung, data yang *purposive*, mengutamakan perspektif *emic*, mementingkan proses dibanding hasil, menonjolkan rincian kontekstual, mengadakan analisis sejak awal, dan bersifat deskriptif (Sugiyono dan Kaelan, 2012). Untuk memahami fenomena yang akan diteliti, penting untuk mengetahui sumber permasalahan yang terjadi dan batasan yang ingin dibahas oleh peneliti, dengan menggunakan metode kualitatif penggalian informasi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada program. Metode kualitatif mempunyai sifat deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal dalam Wanda, 2017:38).

3.2.Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2017 Desa Sabrang dengan waktu penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dimulai bulan September 2020 sampai dengan Maret 2021. Sedangkan batasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait informasi seputar program pembangunan rumah tidak layak huni pada periode tahun 2017 pada saat program dilaksanakan di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Alasan utama peneliti memilih tempat tersebut ialah karena Se-Kecamatan Ambulu, Desa Sabrang merupakan yang memiliki kendala dalam penyaluran Program BSPS tersebut. Seperti yang telah diungkapkan pada latar belakang bahwa ada 1 Dusun dalam Desa Sabrang yang status kepemilikan lahannya bukan milik sendiri. Sehingga menggugah curiositas peneliti untuk mengetahui permasalahannya. Serta pemilihan tahun dikarenakan menurut hasil observasi program yang disebut berhasil diimplementasikan yaitu tahun 2017 tersebut. Sesuai dengan keterangan yang sudah diungkapkan di latar belakang, program BSPS tersebut paling akhir di realisasikan di Desa Sabrang yaitu pada tahun 2017. Sehingga penulis memilih pada tahun tersebut dengan tujuan supaya data yang diperoleh lengkap belum ada yang hilang.

3.3.Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Reaksi masyarakat terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan dampaknya bagi taraf hidup masyarakat” yang objek utamanya merupakan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Dalam penelitian Implementasi kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu, peneliti menggunakan

masing-masing tiga indikator dari variabel yang ada karena peneliti melihat dari indikator tersebut dapat dilihat bagaimana implementasi program yang akan diteliti. Jones tersebut penjelasannya sebagai berikut :

1. Pengorganisasian , indikatornya yaitu :
 - a) Struktur Organisasi pelaksana, kesesuaian pekerjaan yang dilakukan, serta tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Sumber daya manusia dalam organisasi.
 - c) Perlengkapan, alat kerja, sarana dan prasarana, serta biaya operasional.
2. Interpretasi, indikatornya yaitu :
 - a) Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat, yaitu sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang.
 - b) Kesesuaian pelaksanaan dan peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 tahun 2018.
 - c) Kesesuaian petunjuk pelaksanaan dengan petunjuk teknis.
3. Penerapan atau aplikasi, indikatornya yaitu :
 - a) Prosedur kerja dan kejelasan SOP.
 - b) Program kerja dan kejelasan program kerja.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Untuk menjawab persoalan di rumusan masalah dalam fokus penelitian yang sudah dipilih peneliti, maka perlu dilakukan penggalian sumber informasi atau data yang diperlukan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Selain narasumber, informan dalam ruang metode kualitatif ini juga sebagai seseorang individu yang memiliki keterkaitan atau pengalaman khusus dan yang mengerti terhadap fokus penelitian. (Moleong, 2010:132)

Dalam penelitian ini penentuan informan peneliti menggunakan teknik *snowball* sampling yang meliputi perangkat desa dan masyarakat Sabrang pada dasarnya ialah strategi pengambilan sampel yang dikembangkan dengan mengikuti rekomendasi. Peneliti memulai proses

pengambilan sampel dengan menghubungi sejumlah individu untuk dijadikan sample atau informan kunci.

Penulis menjadikan Kepala Desa Sabrang dan juga penanggung jawab Program BSPS sebagai informan kunci. Karena penulis merasa dua orang tersebut yang memahami kurang lebih implementasi dari program tersebut. Kemudian setelah itu, peneliti menelusuri informasi lebih dalam seputar pelaksanaan program di Desa Sabrang yaitu kepada pihak LPM Desa Sabrang, dan berdasarkan petunjuk dan rekomendasi dari pihak LPM peneliti mendapatkan rekomendasi informan pendamping yaitu kepada tenaga pendamping masyarakat penerima bantuan serta informan tambahan yaitu sejumlah penerima bantuan di 4 Dusun yaitu Krajan, Kebonsari, Tegalrejo dan Jatirejo.

Adapun deskripsi informan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1) Informan ZL

Informan ZL merupakan Kepala Desa Sabrang yang menjadi pelindung atas realisasi program BSPS di Desa Sabrang. Selanjutnya sesuai dengan rekomendasi Bapak Kepala Desa terdapat sejumlah informan yang dapat dimintai keterangan terkait implementasi program BSPS tersebut.

2) Informan BY

Informan BY merupakan Penanggung jawab program BSPS di Desa Sabrang. Informan BY berusia 45 tahun, beliau sudah menjadi penanggung jawab program BSPS selama 2 kali. Informan BY aktif di LPM Desa Sabrang sudah hamper 10 tahun sehingga cukup memahami program yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Sabrang, oleh karena itu beliau penulis jadikan sebagai informan kunci bersamaan dengan bapak kepala desa.

3) Informan ES

Informan ES merupakan Tenaga Pendamping Masyarakat program BSPS di Desa Sabrang. Informan ES menjabat sebagai Kepala Dusun Krajan Desa Sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan pendamping untuk mengetahui seberapa besar beliau berkontribusi dalam implementasi program tersebut.

4) Informan DMW

Informan DMW merupakan Tenaga Pendamping Masyarakat program BSPS di Desa Sabrang. Informan DMW menjabat sebagai Kepala Dusun Tegalrejo Desa Sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan pendamping untuk mengetahui seberapa besar beliau berkontribusi dalam implementasi program tersebut.

5) Informan DW

Informan DW merupakan Tenaga Pendamping Masyarakat program BSPS di Desa Sabrang. Informan DW menjabat sebagai Kepala Dusun Kebonsari Desa Sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan pendamping untuk mengetahui seberapa besar beliau berkontribusi dalam implementasi program tersebut.

6) Informan SPRY

Informan SPRY merupakan Tenaga Pendamping Masyarakat program BSPS di Desa Sabrang. Informan SPRY menjabat sebagai Kepala Dusun Jatirejo Desa Sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan pendamping untuk mengetahui seberapa besar beliau berkontribusi dalam implementasi program tersebut.

7) Informan BDRY

Informan BDRY merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun tegalrejo desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

8) Informan BMBG

Informan BMBG merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun tegalrejo desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

9) Informan SMPR

Informan SMPR merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun jatirejo desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

10) Informan ASR

Informan ASR merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun krajan desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

11) Informan SKM

Informan SKM merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun kebonsari desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

12) Informan TMU

Informan TMU merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun tegalrejo desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

13) Informan MLY

Informan MLY merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun jatirejo desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

14) Informan SLAMH

Informan SLAMH merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun kebonsari desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

15) Informan SLIMH

Informan SLIMH merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun krajan desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

16) Informan STM

Informan STM merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun tegalrejo desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

17) Informan TMI

Informan TMI merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun jatirejo desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

18) Informan JN

Informan JN merupakan warga penerima program BSPS yang terdapat di dusun krajan desa sabrang. Beliau penulis jadikan sebagai informan tambahan untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dan kegagalan implementasi program tersebut.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif, data bisa digunakan sebagai penguat fenomena dari fokus penelitian yang akan diteliti. Semakin dalam informasi yang didapatkan akan menentukan hasil peneliitan yang dilakukan guna menemukan substansi untuk menjawab permasalahan yang ada di fokus penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa cara yang digunakan untuk pengumpulan data yakni :

1) Observasi

Dari latar belakang fenomena atau permasalahan yang ditemukan diperlukan pengamatan dan penggalian informasi yang lebih dalam lagi guna mengetahui fenomena dan permasalahan yang hadir sesuai dengan fokus penelitian yang ingin dicapai. Hal demikian dapat dilakukan dengan melakukan suatu pengamatan atau observasi. Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus

dikumpulkan dalam penelitian, observasi tidak terbatas pada manusia saja, melainkan meliputi benda-benda, situasi, ruang, waktu, kondisi, dan segala hal yang berkaitan dengan sumber data dalam objek penelitian. (Kaelan, 2012:101) Yang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: Pertama, observasi berpartisipasi (*participant observation*), Kedua observasi secara terang-terangan dan bersamar (*overt observation and covert observation*). Ketiga observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan langsung pada kondisi rumah warga penerima program, kondisi lingkungan, maupun aktifitas mata pencaharian penerima program itu sendiri. Penggalan data melalui observasi pada penelitian ini berjenis secara terang-terangan dan bersamar (*overt observation and covert observation*). Dikarenakan program ini sudah dilaksanakan tahun 2017. Sehingga pada jenis observasi ini menekankan pada penggalan data melalui observasi dilakukan secara terang-terangan atau sengaja, peneliti akan melakukan penggalan informasi dengan tidak menutupi identitas kepada narasumber maupun informan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan secara tersamar guna mengerahui kemungkinan-kemungkinan di luar topik permasalahan tetapi masih dalam satu fokus kajian. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara dengan informan, dari hasil pengamatan tersebut akan digunakan sebagai kelengkapan data dalam penelitian baik data primer ataupun sekunder.

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang di observasi menurut dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktifitas). (Spradley dalam Sugiyono, 2012:47).

- a) *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
- b) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
- c) *Activity*, atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Tiga elemen utama tersebut dapat diperluas, sehingga apa yang kita dapat amati terdapat Sembilan item utama yang dapat di observasi pada suatu situasi sosial, yaitu : (Sugiyono, 2012).

- a) *Space: the physical place*, ruang dalam aspek fisiknya.
- b) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
- c) *Activity: a set of related acts people do*, yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan orang.
- d) *Object: the physical things that are present*: yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu.
- e) *Act single actions that people do*, yaitu perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu.
- f) *Event: a set of related activities that people carry out*: yaitu rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang.
- g) *Time: the sequencing that takes place over time*: yaitu urutan kegiatan.
- h) *Goal: that things people are trying to accomplish*, yaitu tujuan yang ingin dicapai orang-orang.
- i) *Feeling: the emotion felt and expressed*, emosi yang dirasakan dan diekspresikan oleh orang-orang.

2) Wawancara Mendalam (*in depth interviewing*)

Pada proses wawancara ini merupakan kegiatan bertemunya antara informan, narasumber, atau responden dengan peneliti, berkaitan dengan interaksi dan pandangan seputar topik kajian yang akan diteliti. Dalam wawancara menurut (Kaelan, 2012:110) bertemunya interaksi nyata antara peneliti dengan informan, proses menghadapi kenyataan adanya pandangan orang lain yang kita hadapi ialah bagaimana cara interaksi dengan orang lain, dan bagaimana kita mengolah pandangan yang mungkin berbeda itu.

Pada kegiatan wawancara yang akan dilakukan peneliti dan informan, wawancara dalam ranah metode kualitatif pertama, wawancara percakapan informal. Kedua, pendekatan pedoman wawancara umum. Ketiga wawancara terbuka yang dibakukan. (Patton dalam Wanda, 2017:51). Perbedaan diantara

ketiga pendekatan terletak pada batas-batas tertentu, pertanyaan wawancara ditentukan dan dibakukan sebelum wawancara terjadi. Dalam penelitian ini jenis wawancara disesuaikan dengan informan. Untuk pendekatan wawancara kepada anggota penerima program pembangunann rumah tidak layak huni menggunakan jenis informal. Pada pendekatan ini ialah pemunculan pertanyaan secara spontan dalam arus alami suatu interaksi, pertanyaan wawancara akan berubah sepanjang waktu, dan setiap wawancara dibangun berdasarkan sesuatu terdahulu, perluasan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, bergerak pada arah yang baru, mencari penjelasan dan elaborasi dari berbagai peserta dalam istilah mereka sendiri. (Patton dalam Wanda, 2017:51). Tujuan pendekatan wawancara secara informal ini adalah agar peneliti dan informan dapat menjalin interaksi secara seimbang tidak adanya status pembeda. Berguna agar informan dapat melakukan proses wawancara secara alami dan tanpa tekanan pertanyaan.

Selain itu wawancara yang akan dilakukan peneliti dapat mempermudah pada saat proses interaksi dengan informan yang akan dilakukan, yang dapat ditanyakan dalam wawancara ialah antara lain: Pertama, pengalaman dan perbuatan responden, yakni apa yang telah dikerjakannya atau yang lazim dikerjakannya. Kedua, pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran, atau pikiran tentang sesuatu. Ketiga, perasaan, respon emosional, yakni apakah ia merasa, cemas, takut, senang, gembira, curiga, jengkel, dan sebagainya tentang sesuatu. Keempat, pengetahuan, fakta-fakta apa yang diketahuinya tentang sesuatu. Kelima, penginderaan apa yang dilihat, didengar, diraba, dikecap atau diciumnya, diuraikan secara deskriptif. Keenam, latar belakang, pendidikan, pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, keluarga dan sebagainya (Kaelan, 2012:123).

3) Dokumentasi

Pada pengumpulan data atau informasi baik secara primer berupa wawancara terhadap informan yang sudah ditetapkan, serta observasi di lapangan, dan data sekunder diperlukan guna mendapatkan hasil yang optimal dan benar-benar menemukan data yang lengkap guna mendukung proses keabsahan pembahasan pada topik permasalahan. Selain itu teknik dokumentasi adalah catatan peristiwa

yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seorang lainnya. (Kaelan, 2012:126). Dokumen tersebut dapat didapatkan selama proses sebelum penelitian atau saat penelitian dilakukan. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, *cassette*, dan lain lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, karya lukis, patung, naskah, tulisan, prasasti dan lain sebagainya (Sugiyono, 2012:82).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai macam literatur ilmiah terkait dengan judul penelitian, serta mengumpulkan laporan-laporan terkait implementasi program RTLH di Desa Sabrang. Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan foto terhadap seputar kondisi rumah anggota penerima bantuan program RTLH. Pengambilan foto dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkuat informasi dan pemahaman mengenai manfaat serta pengaruh program yang terjadi pada informan.

3.6. Teknik Analisis Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat menentukan guna mendapatkan data secara mendalam dan mendasar, yang menjadikan keunikan tersendiri pada topik bahasan yang telah ditetapkan peneliti. Sehingga perlu adanya analisis terhadap data yang sudah didapatkan. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, adapun penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Maka penafsiran pada hakikatnya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep dan menggambarkan prespektif penelitian.

1) Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini merupakan hasil dari teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah dilakukan peneliti, pada prinsipnya tahap ini semua data yang diperoleh tidak boleh diproses atau

dikomentari terlebih dahulu, biarkan sesuai dengan hasil pengumpulan data yang sesungguhnya (Patton, dalam Moleong, 2010:103) hingga pada tahap awal pengumpulan data ini tetap pada hasil pengumpulan data sesungguhnya sebelum rancangan reduksi data dipersiapkan.

2) Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti merubah catatan ke dalam bentuk tertulis (baik yang berasal dari *tape recorder* atau catatan lapangan), semua diketik seperti adanya (*verbatim*) tanpa mencampuradukan dengan pendapat dan pikiran peneliti (Wirawan,2011). Dalam tahapan ini peneliti menuliskan atau mengetik semua data yang diperoleh dilapangan baik itu melalui catatan dan rekaman wawancara.

3) Reduksi Data

Dari hasil proses pengumpulan data mentah dari hasil wawancara dengan informan terkait, lalu pengumpulam dokumentasi, dan observasi di lapangan. Dari berbagai data tersebut yang masih asli dan alami, Pada tahap ini merupakan pengklasifikasian data yang benar-benar akan digunakan atau tidak oleh peneliti, Seluruh data di reduksi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya, sehingga data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan (Sugiyono, 2012:52). Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemilihan terhadap informasi-informasi pokok sesuai dengan fokus penelitian, dan peneliti hanya memakai data yang diperlukan, sementara untuk data yang tidak diperlukan atau tidak tergolong dalam kategori fokus penelitian akan direduksi.

3.7.Derajat Keabsahan Data

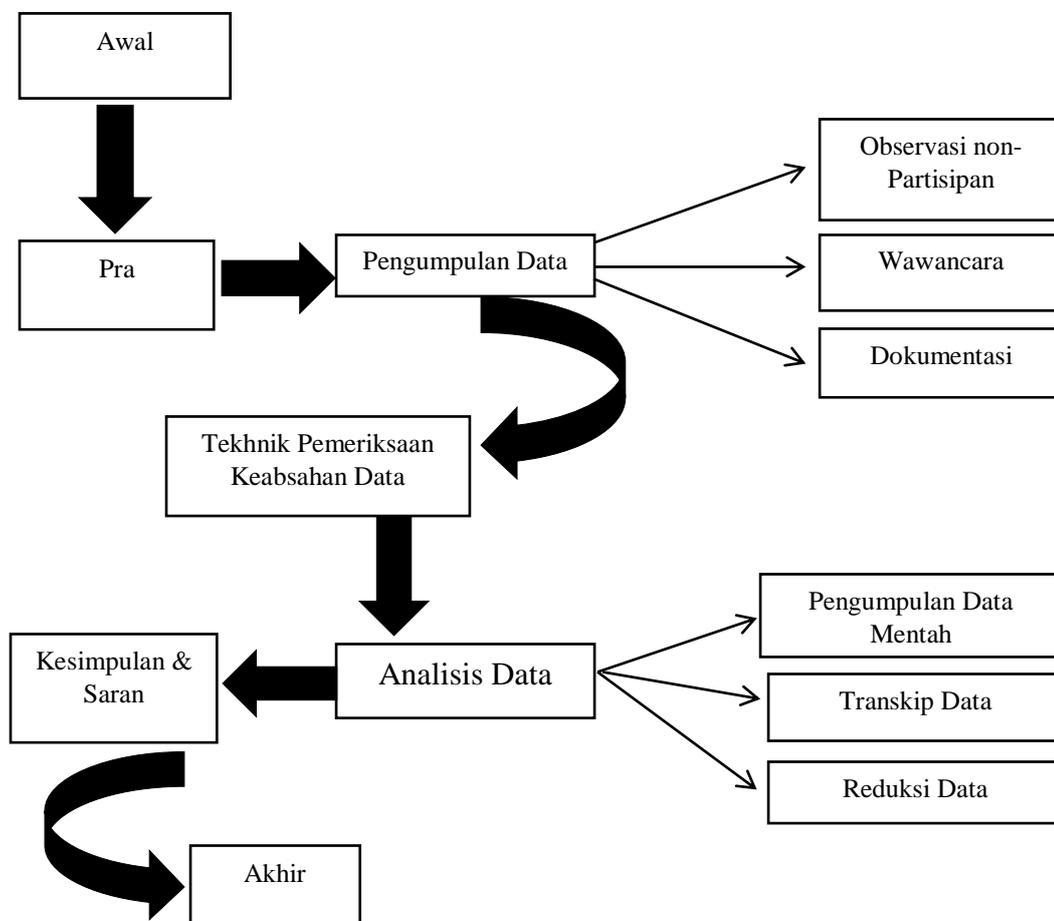
Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan hal yang sangat penting karena keabsahan merupakan kreadibilitas dalam penelitian kualitatif, salah satu unsur untuk keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian

untuk menjangkau data atau informasi. Triangulasi adalah suatu metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif dan sering juga dilakukan dalam metode kuantitatif, untuk mengukur validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Dalam triangulasi ada berbagai jenis salah satunya ialah jenis triangulasi data, adalah triangulasi yang mempergunakan berbagai sumber atau informasi. Pada teknik triangulasi ini adalah mengelompokkan para pemangku kepentingan program dan menggunakannya sebagai sumber data atau informasi. Evaluator harus mempergunakan sebanyak mungkin kelompok-kelompok dan para anggota kelompok pemangku kepentingan dalam evaluasi (Wirawan, 2011:156).

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data atau sumber, triangulasi metode wawancara, dan triangulasi teori untuk memperoleh data atau informasi tambahan yang dapat dijadikan data pembanding. Pada triangulasi data, peneliti membandingkan keterangan antara informan satu dengan informan yang lain. Triangulasi metode peneliti menggunakan metode wawancara yang berbeda terhadap seluruh informan yang ada untuk memperoleh informasi yang akurat. Triangulasi teori peneliti melakukan penyesuaian teori dengan informasi keterangan atau data yang diperoleh dari informan dengan berbagai referensi terkait, hal itu dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian.

3.8. Bagan Alur Penelitian

Bagan alur penelitian merupakan alur atau tahapan yang akan dilakukan peneliti untuk melaksanakan kajian tentang “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017”. Hal yang akan dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi permasalahan serta target dan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya terkait alur penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.3 Bagan Alur Penelitian

Keterangan :

1. Awal, yaitu tahap awal atau persiapan penelitian terhadap masalah yang dihadapi dan persiapan materi untuk mencari data.
2. Pra penelitian, penelitian yang dilakukan sebelum mengumpulkan data. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan observasi pendahuluan ke Sejumlah Desa di Kecamatan Ambulu terkait program BSPS.
3. Pengumpulan data, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data ini menggunakan tiga teknik, yakni observasi Non Partisipan ke Desa Sabrang, melakukan wawancara

dengan informan kunci maupun informan pendamping, teknik dokumentasi serta teknik studi pustaka yang dilakukan dengan cara mencari buku-buku, produk Perundang-Undangan, maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

4. Dalam setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaannya dan keberadaannya dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut dengan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber misalnya dengan cara membandingkan hasil pernyataan informan ketika diwawancarai secara pribadi dengan ketika diwawancarai di depan orang lain.
5. Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
6. Akhir, yaitu berakhirnya penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1.1. Kondisi Geografis Desa Sabrang Kecamatan Ambulu

Desa Sabrang adalah Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan terletak arah ke selatan ± 5 Km dari Kecamatan Ambulu yang memiliki luas Desa $\pm 3.513.194.700$ m² (Data Desa Sabrang) Dengan struktur tanah yang subur dengan ketinggian ± 15 m dari permukaan air laut. Dengan suhu rata-rata 34⁰- 40⁰ C . Secara geografis terletak pada Garis Lintang 08.371757 Lintang Utara / Lintang Selatan dan Garis Bujur 113.6029 Bujur Timur.

Wilayah Desa Sabrang terbagi lima dusun yakni : Dusun Kebonsari dengan luas wilayah $\pm 1.304.438$ m² , di dusun ini terdapat pusat pemerintahan Desa Sabrang . Dusun Krajan dengan luas wilayah $\pm 1.514.635$ m² , merupakan Dusun terdekat dari pusat pemerintahan Desa sabrang . Dusun Tegalrejo dengan luas wilayah ± 857.408 m² , jarak melalui jalan darat menuju pusat pemerintahan desa kisaran 4,2 Km. Dusun Jatirejo dengan luas wilayah ± 293.236 m² jarak melalui jalan darat dengan pusat pemerintahan desa kisaran 6 Km. dan Dusun Ungkalan dengan luas wilayah ± 344.411 M² jarak melalui jalan darat dengan pusat pemerintahan desa kisaran 8,5 Km .

Secara umum batas wilayah Desa Sabrang Kecamatan Ambulu memiliki batas wilyaha sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan : Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu
- b. Sebelah Utara : Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu, Desa Kesilir dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.
- c. Sebelah Barat : Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan
- d. Sebelah Timur : Desa Andongsari Kecamatan Ambulu dan Desa Wonoasri dan Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.

Adapun orbitrasi Desa Sabrang dengan tingkatan diatas yaitu :

❖ Jarak Kantor Desa ke Kantor Kecamatan : ± 4 Km

- ❖ Jarak Kantor Desa ke Kantor Kabupaten : ± 28 Km
- ❖ Jarak Kantor Desa ke Kantor Provinsi : ± 214 Km
- ❖ Jarak Kantor Desa ke Kantor Ibukota Negara : ± 1.082 Km

Kemudian di Desa terdapat 29 Rw dan 88 Rt yang terbagi dalam 5 Dusun dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Dusun Krajan : 9 RW dan 27 RT
- ❖ Dusun Kebonsari : 8 RW dan 24 RT
- ❖ Dusun Tegalrejo : 5 RW dan 15 RT
- ❖ Dusun Jatirejo : 2 RW dan 12 RT
- ❖ Dusun Ungkalan : 5 RW dan 10 RT

4.1.2. Kondisi Demografis Desa Sabrang Kecamatan Ambulu

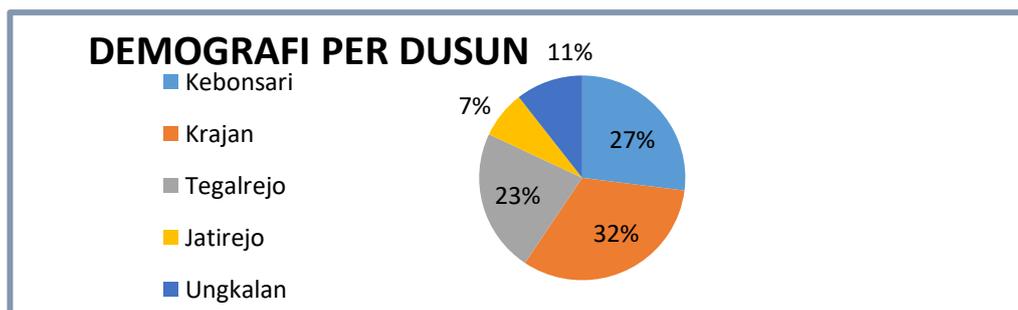
Jumlah Penduduk Desa Sabrang Kecamatan Ambulu terdiri dari 14770 yang terbagi dalam 5 wilayah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Dusun

No.	Dusun	L	P	KK	Jiwa
1.	Krajan	2487	2297	1854	4784
2.	Kebonsari	2012	1974	1392	3986
3.	Tegalrejo	1682	1658	997	3340
4.	Jatirejo	558	545	347	1103
5.	Ungkalan	786	771	472	1557
Total		7525	7245	5062	14770

Sumber : LPPD Desa Sabrang Tahun 2019.

Berdasarkan data diatas dapat Dusun krajan memiliki mobilitas yang tinggi dibanding 4 Dusun yang lain yang terdapat di Desa Sabrang. Selain menjadi pusat pemerintahan Desa Sabrang, dusun krajan juga mempunyai lusan wilayah yang lebih dibandingkan 4 dusun yang lain, dan data diatas dapat disajikan lagi dengan grafis dibawah ini :



Gambar 4.4 Diagram Jumlah Penduduk Desa Sabrang, Sumber: LPPD Desa Sabrang 2019 yang telah diolah.

Pembangunan Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat desa dalam segala profesi maupun mata pecaharian yang dilakukan masyarakat. Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi tingkat kemajuan desa.

Pendapatan perkapita penduduk Desa sangat berpengaruh terhadap pembangunan di desa dalam bentuk pembangunan secara partisipatif masyarakat, pembangunan partisipatif masyarakat yang tampak di bidang pembangunan sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai pembangunan di sektor keagamaan atau tempat-tempat Ibadah dan kegiatan lain.

Membangun di segala sektor terus perlu di dorong dan di bina oleh pemerintahan desa agar hasil pembangunan yang dilaksanakan tidak terjadi tumpang tindih dengan program yang dilakukan pemerintah Desa. Tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Adapun Sumber daya Manusia di Desa Sabrang dalam mata pecahariannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sabrang

NO.	MATA PECAHARIAN	JUMLAH
1.	Petani	2956
2.	Buruh Tani	1307
3.	PNS	144
4.	Tenaga Kesehatan	6
5.	Guru Swasta	94

NO.	MATA PECAHARIAN	JUMLAH
6.	Industri/ Perdagangan/Toko	1956
7.	TNI / POLRI	9
8.	Pensiunan	33
9.	Buruh Industri	102
10.	Pengrajin Tahu	3
11.	Pengrajin Krupuk	2
12.	Pengrajin Gula Merah	2
13.	Pengrajin Bata Merah	8
14.	Pengrajin Genteng	51
15.	Pengrajin Kayu	6
16.	Seni Ukiran kayu	1
17.	Pengrajin Anyaman Bambu	2
18.	Pengrajin Parut	1
19.	Pengrajin cor beton/Batako/Gorong-gorong	7
20.	Olahan makanan ringan/kue	5

Sumber : LPPD Desa Sabrang 2019

Kemudian di sisi lain juga terdapat sarana dan prasarana di Desa Sabrang sesuai Tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Sabrang

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan Desa	52.010	Meter
	b. Jalan Kabupaten	10	Km
	c. Jembatan	14	Titik
	e. Jembatan gantung	1	Titik
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	4	
	b. Gedung TK / RA	8	

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
	c. Gedung SD / MI	11	
	d. Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ)	8	
	e. SMP/MTs	3	
	f. SMK	1	
	g.MA	1	
	g. Pondok Pesantren	3	
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	16	
	b. Polindes	1	
	c. MCK Umum	15	
	d. Sarana Air Bersih	~	
	e.Sumur	5.575	
	f.Jamban	4.910	
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar desa	1	
	b. Tempat Pelelangan Ikan	~	
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Prooduktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	2	Desmigratif
	b. Koperasi	1	Kopwan
6.	Aset Berupa Modal		
	a. Total aset produktif	~	
	b. Total pinjaman di masyarakat	~	
7.	Aspek Spiritual		
	Masjid	13	
	Mushola	46	

Sumber : LPPD Desa Sabrang 2019.

4.2. Hasil Penelitian

1. Pengorganisasian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu

a) Struktur Organisasi Pelaksana, Tugas Pokok dan Fungsinya

Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu pelaksana yang berperan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, berikut struktur organisasinya :

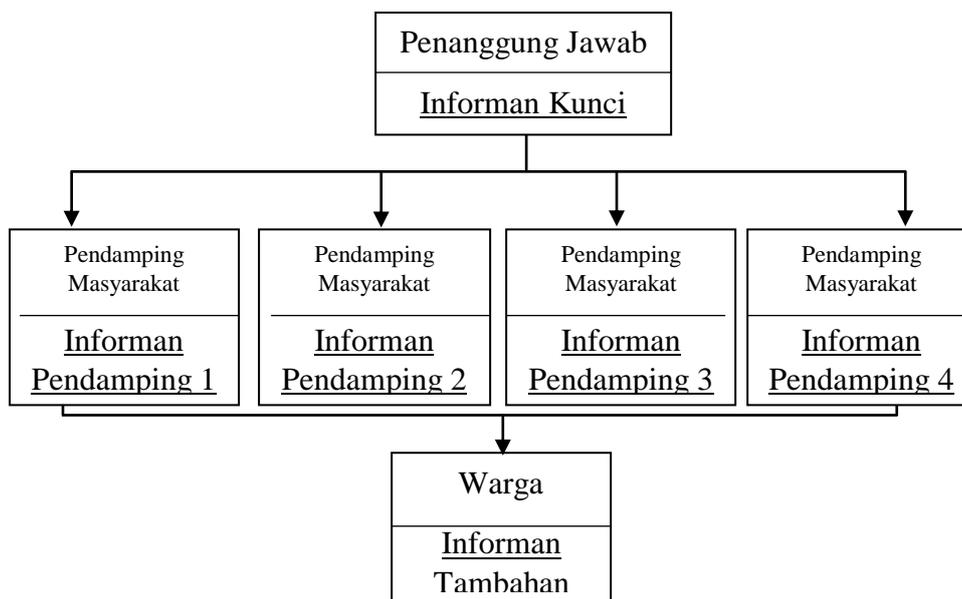
- 1) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang tugas pokok dan fungsinya yaitu:
 - a. Melakukan verifikasi lapangan calon penerima bantuan.
 - b. Memfasilitasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk membuat desain rumahnya berdasarkan keinginan atau kebutuhan.
 - c. Membina dan memberdayakan Kelompok Swadaya Masyarakat.
 - d. Melapor kemajuan kegiatan dan membuat laporan akhir kegiatan

- 2) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. Mensosialisasikan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada masyarakat.
 - b. Melakukan penjangkaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - c. Mengumumkan calon penerima bantuan.
 - d. Menetapkan calon penerima bantuan.
 - e. Mengusulkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Menteri melalui Bupati atau Walikota.
 - f. Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat penerima bantuan.
 - g. Mengajukan pencairan dana bantuan.
 - h. Menerima dana Bantuan Stimulan.
 - i. Menyerahkan langsung dana bantuan stimulan kepada penerima bantuan.
 - j. Melapor penerimaan dan penyaluran dana bantuan stimulan.
 - k. Melapor pelaksanaan kegiatan dengan tembusan Kelompok Kerja Pusat.

- 3) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tugas pokok dan fungsinya yaitu:
- Menyusun detail desain pembangunan atau perbaikan rumah.
 - Membangun rumah penerima bantuan.
 - Melapor pemanfaatan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Badan Keswadayaan Masyarakat.
 - Membuat dan menyetujui daftar hadir Tenaga Pendamping Masyarakat.

Struktur Organisasi pelaksana merupakan kesesuaian pekerjaan yang dilakukan, yaitu pelaksana melakukan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan tersebut serta harus mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, program harus memiliki struktur organisasi atau birokrasi yang jelas serta teratur.

Struktur organisasi Pelaksana Program BSPS di Desa Sabrang



Gambar 4.5 Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Program BSPS Desa Sabrang

Keterangan :

- Zubaeri Lutfi = Kepala Desa (Informan Kunci)
- Boyadi = Penanggung Jawab Program BSPS (Informan Kunci)
- Edi Sujarwo = Tenaga Pendamping Masyarakat (Informan Pendamping)

4. Damawi = Tenaga Pendamping Masyarakat (Informan Pendamping)
5. Dedi Wijaya = Tenaga Pendamping Masyarakat (Informan Pendamping)
6. Supriyono = Tenaga Pendamping Masyarakat (Informan Pendamping)
7. Badriyah = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
8. Bambang = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
9. Sampir = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
10. Asari = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
11. Sukiman = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
12. Temu = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
13. Mulyono = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
14. Salamah = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
15. Salimah = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
16. Satemi = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
17. Temi = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)
18. Jono = Warga Penerima Bantuan (Informan Tambahan)

Struktur organisasi program bantuan ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh penanggung jawab program sebagai berikut :“Struktur organisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang ini dimulai dari Kelompok Kerja Pusat lalu menuju ke bawah di Kelompok Kerja Provinsi, ke Kelompok Kerja Kabupaten, hingga ke Kelompok Swadaya Masyarakat”. {Hasil Wawancara Penanggung Jawab (Boyadi), 12 Oktober 2020}.

Hal serupa dikatakan oleh Kepala Desa Sabrang Kecamatan Ambulu selaku pengawas terkait struktur organisasi dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini yang mengatakan bahwa : “Struktur organisasi yang jelas dimulai dari Pemerintah Pusat, turun sampai ke Kabupaten, lalu ke Kecamatan dan ke Desa-desa. di Desa ada lagi yang namanya Tenaga Pendamping Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok penerima bantuan.” {Hasil Wawancara Kepala Desa (Zubaeri Lutfi), 12 Oktober 2020}.

Adapun mengenai tugas dan fungsi sebagaimana yang disampaikan Tenaga Pendamping Masyarakat sebagai berikut :

“Tugas dan fungsi kami sebagai pelaksana kami sudah kerjakan dengan baik. Saya sudah melakukan tugas-tugas saya sebagaimana mestinya, saya juga sudah melakukan pendampingan sosialisasi di desa. Memang Saya hanya menerima data dari Badan Keswadayaan Masyarakat berupa KK dan KTP serta foto-foto rumah calon penerima. namun setelah itu saya tidak terlalu berkomunikasi dengan baik, saya selalu berkoordinasi dengan Pemerintah setempat. Saya melakukan koordinasi ke Kepala Desa dan justru Kepala Desa yang selalu melaporkan sejauhmana perkembangan rumah warganya yang menerima dengan memberikan hasil foto-foto. Adapun penyusunan laporan sepenuhnya saya yang mengerjakan. Memang data yang saya dapat dari Kantor Desa, namun saya sudah bekerja sama semaksimal supaya pekerjaan cepat terselesaikan.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Dedi Wijaya), 15 Oktober 2020}.

Hal serupa dikatakan oleh Boyadi selaku penanggung jawab program terkait tugas dan fungsi nya dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini yang mengatakan bahwa : “Saya memberikan data berupa KK dan KTP yang berhak menerima. Foto-foto rumah pun saya lakukan bersama Ketua RT.” {Hasil Wawancara Penanggung Jawab (Boyadi), 12 Oktober 2020}.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari pelaksana BPS di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu, yaitu struktur organisasinya dimulai dari tingkat pusat hingga ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penerima bantuan. Pada prakteknya para pelaksana masih belum mampu mengerjakan tugasnya. Pelaksana hanya mengerjakan tugasnya yang bersifat teknis saja mengumpulkan data masyarakat calon penerima dan memfoto rumah warga calon penerima namun seperti yang diketahui data tersebut juga hanya diambil di Kantor Kepala Desa.

b) Sumber Daya Manusia dalam Organisasi

Indikator sumber daya manusia dalam organisasi yaitu kualitas dari orang yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya masing-masing. Implementasi program harus didukung dengan sumber daya yang layak dan memadai. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, kompetensi implementor dan juga sumber daya finansial.

Tabel 4.6 SDM dalam Organisasi

No.	Nama	Bagian Tugas	Keahlian	Pendidikan
1.	Dedi Wijaya	Tenaga Pendamping Masyarakat Dusun Kebonsari	Ahli dalam mengoperasikan komputer	SMA
2.	Edi Sujarwo	Tenaga Pendamping Masyarakat Dusun Kraja	Berpengalaman merealisasikan program	SMA
3.	Damawi	Tenaga Pendamping Masyarakat Dusun Kebonsari	Berpengalaman merealisasikan program	SMA
4.	Supriyono	Tenaga Pendamping Masyarakat Dusun Kebonsari	Berpengalaman merealisasikan program	SMA
5.	Salimah	Warga Penerima Dusun Krajan	-	SD
6.	Sukiman	Warga Penerima Dusun Kebonsari	-	SD
7.	Bambang	Warga Penerima Dusun Tegalrejo	-	SMP
8.	Sampir	Warga Penerima Dusun Jatirejo	-	SD

Sumber : LPM Desa Sabrang 2020

Mengenai kapabilitas sumber daya manusia dalam organisasi berikut yang disampaikan oleh penanggung jawab program:

“Sumber Daya Manusia yang ada belum bisa dikatakan mampu dan memadai. Mereka pada dasarnya hanya kurang memahami teori sehingga belum bisa optimal dalam mempraktekkannya. Namun menurut saya para pelaksana yang ada di Desa Sabrang sudah cukup kompeten karena pekerjaan yang dilakukan walaupun bukan tugasnya hasilnya baik dan cukup membantu dalam pelaksanaan program.”
{Hasil Wawancara Penanggung Jawab (Boyadi), 12 Oktober 2020}.

Tenaga Pendamping Masyarakat Dusun Kebonsari mengungkapkan tentang pelaksanaan program: “Saya yang selalu mengerjakan sendiri keperluan dokumen penerima. Karena pelaksana yang lain sama sekali tidak bisa untuk mengoperasikan komputer.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Dedi Wijaya), 15 Oktober 2020}.

Hal demikian dijelaskan pula oleh Tenaga Pendamping Masyarakat di Dusun Jatirejo bahwa : “Masyarakat rata-rata kurang mampu memaksimalkan hasil kerja sehingga saya turun tangan untuk membantu. Sehingga kita disini saling bantu supaya pekerjaan dapat cepat terselesaikan.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Supriyono), 16 Oktober 2020}.

Mengenai Sumber Daya Manusia, penerima bantuan menilai pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang, berikut pernyataan dari salah satu penerima bantuan di dusun krajan yaitu : “Menurut saya pengurusnya baik dan sangat membantu. Masyarakat disini banyak yang tidak tamat sekolahnya, sehingga semua mengenai administratif diserahkan ke pengurus.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Asari), 16 Oktober 2020}.

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Program memang sangat dibutuhkan. Berikut ungkapan Kepala Desa Sabrang selaku pelindung yaitu :

“Sumber Daya Manusia saya rasa sudah cukup memadai. Karena para pelaksana dari program bantuan ini saya yang rekomendasikan langsung. Jadi saya jamin memang orang-orang yang sudah berpengalaman. Saya lihat semua hasil kerjanya cukup bagus walaupun belum bisa dikatakan sangat baik.” {Hasil Wawancara Kepala Desa (Zubaeri Lutfi), 12 Oktober 2020}.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait sumber daya manusia yang terdapat dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaksana yang ada masih belum memadai karena masih belum mampu mengerjakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti syarat administratif warga penerima dikerjakan oleh satu Tenaga Pendamping yang bisa mengoperasikan komputer dan 3 yang lain lebih fokus ke lapangan. Hal tersebut menunjukka bahwa SDM belum cukup memadai untuk dapat menjalankan program secara optimal.

c) Perlengkapan, Alat Kerja, dan Biaya Operasional

Indikator ini mencakup hal-hal yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas dari aparat yang terlibat agar mampu mengerjakan tugasnya secara baik. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam sebuah program diantaranya seperti yang dibutuhkan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat yaitu fasilitas komputer untuk menginput data calon penerima, alat print dan fotokopi untuk persiapan berkas, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima bantuan yaitu alat tukang dalam pembangunan rumah, dan sebagainya.

Mengenai apakah ada perlengkapan, alat kerja, dan biaya operasional atau tidak, berikut yang disampaikan oleh penanggung jawab program :“Program ini adalah program bantuan swadaya. Jadi memang tidak ada alat kerja dan perlengkapan diberikan. Jadi masyarakat hanya diberi bantuan dana berupa bahan bangunan dan biaya tukang. Selebihnya itu tanggungan Pemerintah Desa secara swadaya.” {Hasil Wawancara Penanggung Jawab (Boyadi), 12 Oktober 2020}.

Hal yang sama diungkapkan juga oleh Kepala Desa Sabrang yang menyatakan bahwa :

“Tidak ada dana untuk perlengkapan. Disini yang kami hanya menggunakan perlengkapan seadanya saja, masyarakat secara swadaya menggunakan alatnya karena memang kami hanya di berikan bahan bangunan setelah itu kami saling membantu antar warga dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya tersebut.” {Hasil Wawancara Kepala Desa (Zubaeri Lutfi), 15 Oktober 2020}.

Begitupun dengan yang disampaikan Tenaga Pendamping Masyarakat di Desa Sabrang yang dalam bekerja menggunakan perlengkapan milik sendiri, sebagai berikut :

“Tidak ada perlengkapan dan alat kerja yang diberikan. Jadi memang saya kebanyakan pakai laptop saya sendiri untuk bekerja, saya hanya digaji untuk bekerja dengan gaji yang dijanjikan 1,8 setiap bulannya justru didapatkan setelah rumah penerima selesai dikerjakan. Dalam pelaksanaan program bantuan ini, tidak ada alat kerja yang diberikan. Jadi kalau memang ada data yang perlu di fotokopi atau menggunakan biaya, biasanya kita menggunakan uang dari kantor atau biasa juga pakai alat dari Kantor Desa. Tidak ada perlengkapan dan alat kerja yang diberikan. Hanya bahan bangunan saja dan ongkos tukang 2,5 juta tapi itupun tidak cukup karena mana ada tukang mau dibayar harga

segitu. Jadi kita hanya kerja rumah secara gotong royong sama warga. Perlengkapan yang dipakai juga kita yang cari sendiri dengan cara pinjam punya warga yang lain” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Dedi Wijaya), 16 Oktober 2020}.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh penerima bantuan di Desa Sabrang, penjelasannya sebagai berikut : “Kita tidak dapat alat atau perlengkapan apapun. Kita hanya bekerja dengan alat seadanya. Kalaupun ada kekurangan atau ada alat yang dibutuhkan tidak ada, kita gunakan uang sendiri untuk beli.” {Hasil Wawancara Warga Penerima (Badriyah), 16 Oktober 2020}.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang tidak ada perlengkapan, alat kerja maupun biaya operasional yang diberikan. Masyarakat yang ada secara swadaya membantu dalam pelaksanaan program dan dalam pengerjaan rumah warga yang menerima bantuan. Bantuan ini memang dikerjakan secara swadaya masyarakat dan pemerintah setempat dan memang dalam pelaksanaan tidak ada perlengkapan, alat kerja, dan biaya operasional bagi para penerima bantuan mereka menggunakan dananya sendiri guna membeli perlengkapan dan alat kerja yang mereka butuhkan dalam pembangunan rumahnya.

2. Interpretasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu

a) Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat

Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat yang dimaksud yaitu bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada pelaksana dan kepada masyarakat dalam memberitahukan tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam pelaksanaan program bantuan ini sesama pelaksana harus selalu berkoordinasi mengenai sejauhmana realisasi dari program, dan bagaimana para pelaksana bisa menyampaikan apa maksud dari program kepada masyarakat calon penerima bantuan.

Penanggung jawab program mengungkapkan tentang bagaimana sosialisasi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu adalah sebagai berikut : “Sosialisasi tentu ada dan kami sudah laksanakan itu, walaupun ada warga yang tidak tahu tentang

program bantuan ini saya rasa itu mustahil karena di desa juga sudah di sosialisasikan kepada masyarakat.” {Hasil Wawancara Penanggung Jawab (Boyadi), 15 Oktober 2020}.

Terkait tentang komunikasi pelaksana dan masyarakat, Kepala Desa Sabrang mengungkapkan bahwa :“Komunikasi kami berjalan lancar dengan para pelaksana. Khususnya Tenaga Pendamping Masyarakat. Tenaga Pendamping Masyarakat selalu berkoordinasi dengan kami mengenai sejauhmana perkembangan pembangunan rumah ataupun hal yang lainnya.” {Hasil Wawancara Kepala Desa (Zubaeri Lutfi), 20 Oktober 2020}.

Hal serupa Seperti yang diungkapkan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat di Desa Sabrang sebagai berikut :

“Kalau kami hanya bertugas mendampingi untuk sosialisasi desa saja. Jadi warga dikumpulkan di balai desa kemudian diberikan sosialisasi dan dijelaskan tentang bagaimana dan tentang apa program bantuan ini. Menurut saya program ini bukan program pemberdayaan karena masyarakat hanya disuruh membangun rumah dan dilaporkan kegiatannya tanpa diketahui bagaimana kelanjutannya.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Edi Sujarwo), 20 Oktober 2020}.

Hal yang hampir sama disampaikan oleh penerima bantuan di Desa Sabrang yaitu : “Kami menerima bantuan ini, saat itu kami dipanggil untuk datang ke balai desa setelah itu ada orang yang datang ke rumah dan menyuruh untuk mengumpulkan KK dan KTP. Kami pikir dia datang ke semua rumah warga tetapi kata tetanggaku tidak.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Sampir), 16 Oktober 2020}.

Begitu juga yang diungkapkan oleh warga Dusun Tegalrejo selaku penerima bantuan di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu yang mengatakan bahwa:“Tidak ada sosialisasi yang dilakukan di balai desa, kami hanya mendengar-dengar saja dan di data dengan cara orang dari kantor desa datang ke rumah minta KK dan KTP dan katanya mau dapat bantuan pembangunan rumah. {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Bambang), 16 Oktober 2020}.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait komunikasi antar pelaksana dan masyarakat yaitu sosialisasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang sudah dilakukan. Sosialisasi yang

dilakukan ada dua yaitu sosialisasi desa yang dilakukan di balai desa dan sosialisasi langsung yang pelaksana langsung mendatangi rumah warga untuk mendata. Kepala Desa yang selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Masyarakat yang ada tentang pelaksanaan program bantuan dan sejauhmana perkembangannya.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan pelaksana belum secara menyeluruh kepada masyarakat karena hanya sebagian masyarakat yang tahu tentang adanya bantuan ini. Dan yang di sosialisasikan pun hanya kepada warga yang dianggap berhak menerima bantuan karena sosialisasi dilakukan sekaligus mendata masyarakat yang ingin diajukan untuk menjadi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, bahwa sudah dilaksanakan sosialisasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang. Penanggung jawab program mengatakan sosialisasi tentang program bantuan ini sudah dilaksanakan. Sosialisasi program di Desa Sabrang dilakukan dengan sosialisasi desa. Berdasarkan informasi yang diterima peneliti bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang memang masih kurang untuk disosialisasikan. Karena masih banyak warga yang belum mengetahui tentang adanya program bantuan ini.

Satu diantara semua penerima bantuan menyatakan bahwa tidak dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan kebanyakan masyarakat hanya mendengar saja bahwa akan ada bantuan, pendataan dan sosialisasi dilakukan hanya kepada warga yang dianggap memang butuh untuk pembangunan rumahnya. Dengan demikian, mengenai komunikasi yang dilakukan dalam sosialisasi masih sangat kurang kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan pelaksana belum secara menyeluruh kepada masyarakat, karena hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang adanya bantuan ini. Serta yang disosialisasikan pun hanya kepada warga yang dianggap berhak menerima bantuan karena sosialisasi dilakukan sekaligus mendata masyarakat yang ingin diajukan untuk menjadi

penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hal inilah yang dapat membuat adanya kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

Dalam interpretasi sangat membutuhkan penjelasan dan pemahaman yang dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaksana dan sasaran kebijakan. Program kebijakan harus memiliki petunjuk teknis dan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman oleh pelaksana program. Agar program dan tujuannya dapat tercapai dengan optimal. Para pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang diharuskan untuk mampu menjalankan program kebijakan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan-tujuan yang diharapkan mampu tercapai.

b) Kesesuaian Pelaksanaan dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 tahun 2018

Ada tiga hal utama dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 yang peneliti gunakan sebagai indikator dalam menganalisis pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang yaitu tujuan dan sasaran.

1) Tujuan

Tujuan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 adalah untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah yang layak dihuni dengan lingkungan yang sehat serta aman.

Penanggung jawab program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang mengungkapkan sebagai berikut :

“Program ini adalah program yang membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang rumah ditempatinya tidak layak untuk di huni, supaya bisa membangun rumahnya menjadi layak untuk di huni, seperti dindingnya permanen, dan juga toiletnya. {Hasil Wawancara Penanggung Jawab (Boyadi), 15 Oktober 2020}.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Desa Sabrang terkait hal ini Berikut keterangannya :“Ya betul, Saya rasa sudah sangat sesuai dengan peraturan yang ada. Karena yang kami masukkan memang rumah yang betul-betul berhak untuk

menerima. Dan kami laksanakan juga dengan baik sampai rumah warga betul-betul menjadi layak untuk dihuni.” {Hasil Wawancara Kepala Desa (Zubaeri Lutfi), 20 Oktober 2020}.

Terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dengan Peraturan Menteri Perumahan Nomor 07 Tahun 2018. Tenaga Pendamping Masyarakat di Desa Sabrang menyampaikan :“Tujuan dari program ini adalah membantu mewujudkan pembangunan rumah. Jadi bantuannya itu tidak seratus persen. Tapi saya lihat rumah penerima semuanya telah terbangun dengan baik sesuai dengan dana dan kemampuan dana yang disediakan penerima sendiri.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Damawi), 16 Oktober 2020}.

Hal yang serupa diungkapkan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat di Desa Sabrang yang mengungkapkan bahwa :“Peraturan Menteri Perumahan Rakyat adalah pedoman kami dalam mengerjakan tugas. Jadi kami akan selalu tahu apa tujuan dari program tersebut dan itu akan membuat kami bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Supriyono), 16 Oktober 2020}.

Program bantuan ini merupakan program yang berpedoman pada Peraturan Menteri, namun tidak sepenuhnya untuk pembangunan rumah atau perbaikan rumah masyarakat. Tujuan rumah yang layak huni juga bergantung pada kemampuan masyarakat dalam berswadaya. Rumah yang terdapat di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu sudah terdapat peningkatan kualitas rumahnya dibanding dengan kondisi sebelumnya.

2) Sasaran

Ada dua jenis kriteria yang harus dipenuhi mengenai sasaran pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu kriteria objek bantuan dan kriteria penerima bantuan. Kriteria penerima bantuan seperti yang disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018. Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan :

- a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah.

- c. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- d. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan.
- e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi.
- f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Adapun kriteria objek bantuan pembangunan rumah baru yaitu :

- a. Berada di atas tanah yang jelas batas-batasnya dan dikuasai secara fisik, bukan tanah warisan yang belum dibagi, tidak berstatus tanah sengketa, penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang.
- b. Luas lantai bangunan paling rendah 36 meter persegi dan paling tinggi 45 meter persegi.
- c. Merupakan rumah pertama atau satu-satunya rumah dalam kepemilikan yang kondisinya rusak berat, luas tanah bangunan tidak cukup yaitu minimal luas 9 meter persegi per anggota keluarga, bahan lantai dan dinding tidak memadai.

Berkaitan dengan sasaran penerima bantuan, Tenaga Pendamping Masyarakat Desa Sabrang menyampaikan bahwa :“Penerima bantuan ini sudah tepat sasaran. Karena yang dapat bantuan memang rumahnya tidak layak dihuni.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Supriyono), 16 Oktober 2020}.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Desa Sabrang Kecamatan Ambulu yang menyampaikan bahwa penerima bantuan di desanya sudah tepat sasaran :“Di Desa Sabrang kami jamin semuanya sudah tepat sasaran. Karena kami sendiri yang mendata dan foto-foto secara langsung rumah calon penerima bantuan.” {Hasil Wawancara Kepala Desa (Zubaeri Lutfi), 16 Oktober 2020}.

Pendapat diatas merupakan ungkapan dari pelaksana, berikut ungkapan penerima bantuan di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu yang mengatakan :“Saya sudah dapat bantuan ini karena memang rumah saya tidak layak huni. Tapi ada juga tetangga saya yang tidak dapat padahal rumahnya juga tidak layak. Apa

“mungkin karena bantuannya terbatas.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Asari), 16 Oktober 2020}.

Penerima bantuan yang ada di Desa Sabrang sudah tepat sasaran. Namun karena bantuannya terbatas, masih banyak terdapat warga yang memiliki rumah tidak layak huni yang belum terbantu.

c) Kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Dalam pelaksanaan program harus dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksana. Petunjuk yang ada biasanya yang tertera merupakan petunjuk yang masih dikatakan umum dan itu akan membuat pelaksana memahami interpretasi yang salah dilapangan. Adapun petunjuk teknisnya sebagai berikut :

- 1) Tahapan pertama yaitu pengusulan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh para calon penerima bantuan, lalu proses verifikasi, dan kemudian akan dilakukan penetapan lokasi. Setelah penetapan lokasi yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat serta Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan akan dilakukan penyiapan kepada masyarakat. Kegiatan akhir tahapan persiapan dengan penetapan calon penerima bantuan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja.
- 2) Tahap kedua penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu, tahap pelaksanaan yang meliputi kegiatan pencairan atau pelelangan prasarana, sarana, serta utilitas umum yang dilanjutkan dengan penyaluran atau pekerjaan rumah, dan pemanfaatan.
- 3) Tahap ketiga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa pelaporan, yaitu bentuk pertanggung jawaban dari penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang akuntabel dan transparan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penanggung jawab program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat Desa Sabrang Kecamatan Ambulu menyampaikan bahwa :

“Kalau menurut kami pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, karena kami juga selalu menunggu instruksi dari pusat. Jikapun ada perubahan teknis saya akan langsung mengkoordinasikannya kepada Tenaga Pendamping Masyarakat yang ada. Teknis yang ada dilapangan tentu masih ada kekurangannya karena kondisi di lapangan juga berbeda-beda. Dan walaupun ada kekurangan nanti akan diperbaiki kedepannya.” {Hasil Wawancara Penanggung Jawab (Boyadi), 15 Oktober 2020}.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat dari Desa Sabrang yang mengatakan :

“Kami sudah melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Dan secara administrasi memang sudah sesuai. Karena kalau tidak sesuai dengan petunjuk data yang dimasukkan tidak akan lolos verifikasi di pusat. Dan juga kami menerima instruksi petunjuk dari koordinator dengan disampaikan secara langsung pada saat bimbingan dan briefing.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Dedi Wijaya), 16 Oktober 2020}.

Hal yang hampir sama mengenai kesesuaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis juga disampaikan Kepala Desa Sabrang yang mengatakan :“Kami melihat apa yang dikerjakan oleh para pelaksana sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Walaupun ada hal yang tidak dimengerti pelaksana yang ada selalu meminta bantuan dari Pemerintah Desa, dan walaupun ada hal yang bisa dibantu maka akan kami bantu.” {Hasil Wawancara Kepala Desa (Zubaeri Lutfi), 15 Oktober 2020}.

Pendapat diatas merupakan ungkapan dari pelaksana, berikut ungkapan penerima bantuan di Desa Sabrang yang mengungkapkan bahwa :“Saya memberikan berkas saya yang diperlukan setelah itu menunggu nama saya keluar setelah itu dananya juga saya terima langsung berupa uang untuk gaji tukang dan lainnya itu bahan material.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Sukiman), 16 Oktober 2020}.

Hal yang sama juga disampaikan oleh penerima bantuan yaitu warga Dusun Tegalrejo yang mengatakan :“Saya sudah menerima dana bantuannya setelah saya lolos verifikasi dan nama saya keluar. Setelah dana saya terima saya pun membangun rumah yang lebih baik dari sebelumnya dan sudah layak untuk saya huni dan keluarga. Dan seperti biasa saya selalu berkomunikasi dengan pak RT

mengenai bantuan ini.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Temu), 16 Oktober 2020}.

Hal yang sama dikatakan oleh penerima bantuan yaitu warga Dusun Jatirejo yang mengatakan bahwa :“Saya tidak begitu sering ketemu dengan pelaksana yang ada. Paling kalau ketemu dulu saya hanya tanyakan kapan bantuannya cair.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Mulyono), 16 Oktober 2020}.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait kesesuaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu tidak begitu sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang ada. Persyaratan administrasi yang dimasukkan sudah memenuhi syarat dan lolos verifikasi di pusat. Adapun masalah petunjuk, pelaksana hanya mendengar tanpa benar-benar paham tentang petunjuknya. Tenaga pendamping masyarakat dan juga pelaksana lainnya hanya sekedar memberikan dana bantuan tanpa betul-betul membina masyarakatnya secara langsung di lapangan. Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut diketahui bahwa di Desa Sabrang, Petunjuk Pelaksanaan yang dilakukan belum sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan.

Terkait masalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disampaikan secara langsung dihadapan para pelaksana dan penerima bantuan namun dinilai peneliti masih kurang efektif karena para pelaksana mendengarkan sekilas saja. Seperti yang dikatakan Tenaga Pendamping Masyarakat di Desa Sabrang yang mengatakan baik pelaksana dan dan penerima bantuan masih kurang paham betul tentang petunjuk yang ada karena petunjuknya hanya didengarkan pada saat sosialisasi saja.

Menurut peneliti akan lebih baik jika petunjuk tersebut diberikan salinannya untuk dipelajari oleh masing-masing pelaksana agar mereka memahami betul apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Hal tersebut dianggap penting agar para pelaksana tidak mempunyai interpretasi yang berbeda-beda diantara para pelaksana dan peneriman bantuan.

3. Penerapan atau Aplikasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu

a) Prosedur kerja dan kejelasan SOP

Dalam hal ini cara kerja dan Standar Operasional Prosedur yang dilakukan harus jelas pengerjaannya agar implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun prosedur kerja dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan tokoh kepentingan
- 2) Sosialisasi dengan calon penerima bantuan
- 3) Verifikasi rumah calon penerima bantuan
- 4) Pergorganisasian calon penerima bantuan
- 5) Penyusunan proposal (berkas administrasi)
- 6) Pengesahan proposal oleh tim teknis
- 7) Pengusulan proposal ke pemerintah pusat
- 8) Penetapan penerima bantuan
- 9) Penyusunan rencana teknis
- 10) Pengadaan bahan bangunan
- 11) Pembangunan
- 12) Pemeriksaan dan pelaporan

Penanggung jawab program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat Desa Sabrang Kecamatan Ambulu menyampaikan bahwa :

“Kami rasa prosedur dari program bantuan ini sudah jelas. Mulai dari sosialisasi, usulan, pencairan dan bantuan, sampai kegiatan pembangunan rumahnya sudah dijelaskan. Baik itu kepada para pelaksana maupun kepada masyarakat. Dan saya rasa juga pelaksana sudah mengikuti standar operasional yang ada.” {Hasil Wawancara Penanggung Jawab (Boyadi), 15 Oktober 2020}.

Hal yang sama disampaikan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat dari Desa Sabrang yaitu :

“Program bantuan ini saya rasa prosedurnya belum jelas. Kami tidak menerima Standar Operasioanl Prosedur (SOP) yang resmi. Jadi kami hanya kerja berdasarkan pengalaman kami di program lain saja dan

saya lihat juga pelaksana yang ada rata-rata orang yang paham tentang program semua.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Damawi), 16 Oktober 2020}.

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat dari Desa Sabrang yaitu :“Standar Operasional Prosedur memang ada tapi tidak ada prosedur yang tertulis diberikan jadi masih kurang jelas. Seperti bagaimana prosedur pelaksanaannya kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Supriyono), 16 Oktober 2020}.

Pendapat diatas merupakan ungkapan dari pelaksana, berikut ungkapan dari warga penerima bantuan oleh masyarakat Dusun Krajan Desa Sabrang yang mengatakan bahwa :“Kalau masalah prosedur saya tidak tahu. Saya hanya ikuti arahan yang ada. Lagi pula hanya kumpul KK dan KTP saja setelah itu tinggal tunggu dananya cair kalau nama kita keluar.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Salimah), 16 Oktober 2020}.

Hal yang hampir sama disampaikan oleh penerima bantuan masyarakat Dusun Kebonsari yang mengatakan yaitu :“Tidak ada cara-cara yang bagaimana. Saat itu kita hanya disuruh kumpul KK dan KTP lalu menunggu nama keluar. Waktu pembangunan rumah juga tidak ada instruksi bagaimana. Setelah bahan bangunan ada kita bangun rumah sesuai mau kita saja.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Salamah), 16 Oktober 2020}.

Hal yang sama juga dikatakan oleh penerima bantuan masyarakat Dusun Tegalrejo yang mengatakan yaitu :

“Prosedurnya sama saja dengan bantuan-bantuan sebelumnya. Ada petugas dari Kantor Desa datang mendata dengan minta KK dan KTP serta foto-foto rumah. Selang beberapa bulan bantuan pun datang kerumah dengan berbentuk bahan material dan dikasih tunai biaya tukangnyanya.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Satemi), 16 Oktober 2020}.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait prosedur kerja dan kejelasan dari SOP yaitu prosedur kerja yang ada di Desa Sabrang kurang jelas. Semua kegiatan yang dilakukan sudah berdasarkan prosedur kerja yang ada. Namun prosedur yang diberikan kepada pelaksana yaitu Tenaga Pendamping Masyarakat tidak begitu jelas. Maka dari itu dalam pelaksanaan Tenaga Pendamping Masyarakat berpatokan pada program yang pernah dikerjakan dulu.

Prosedur-prosedur yang digunakan dalam bantuan ini dianggap sama saja oleh penerima bantuan yaitu dengan mengumpulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan menunggu bantuan datang. Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Pendamping Masyarakat hanya menunggu instruksi yang diperintahkan dari pemerintah yang lebih di atasnya. Penerima tidak mengetahui masalah prosedurnya dengan jelas. Penerima hanya mengikuti instruksi dari pelaksana dan tinggal menunggu saja nama keluar dan bantuan cair, tidak ada prosedur khusus yang diberikan. Mereka hanya disuruh mengumpulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. setelah dan bantuannya cair, mereka juga diberi kebebasan untuk mebnagun rumahnya kapan saja sesuai dengan kemauan penerima.

Dalam penerapan atau aplikasi harus ada prosedur kerja yang jelas sehingga program bisa berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan dan tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat diperlukan dalam sebuah program, prosedur kerja yang jelas bisa membantu pelaksana program kebijakan menjalankan dan mengelola suatu pekerjaan secara baik. Itu akan membuat implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang berjalan dengan baik.

Terkait tidak jelasnya prosedur dalam bekerja, dalam melaksanakan tugas Tenaga Pendamping Masyarakat hanya menunggu instruksi yang diperintahkan. Dengan begitu, akan membuat pelaksanaan program bantuan di Desa Sabrang masih kurang tercapai karena Standar Operasional Prosedurnya tidak jelas diberikan kepada para pelaksana. Penerima bantuan pun tidak begitu paham tentang prosedur pelaksanaan bantuan stimulan ini. Mereka hanya mengikuti arahan dari pelaksana program dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan serta menunggu dana bantuannya cair.

Dari hasil pembahasan tersebut diketahui bahwa penerima tidak mengetahui masalah prosedurnya dengan jelas. Penerima hanya mengikuti instruksi dari pelaksana. Dengan tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas di Desa Sabrang maka pelaksanaannya pun tidak akan jelas. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang tidak jelas tersebut hanya disampaikan kepada

pelaksana secara lisan akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan program. Hingga pada akhirnya semua akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan sehingga tujuan dari program ini tidak akan tercapai dengan baik.

b) Program kerja dan kejelasan program kerja

Dalam hal ini akan dilihat apakah program kerjanya berjalan baik dan jelas serta apakah program kerja tersebut dipahami masyarakat dengan baik di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu. Mengenai program kerja ini, penanggung jawab menjelaskan bahwa :“Saya rasa program ini adalah program kerja yang bagus. Karena kegiatannya terencana dan telah diagendakan dengan baik setiap langkahnya.” {Hasil Wawancara Penanggung Jawab (Boyadi), 15 Oktober 2020}.

Sedangkan menurut Kepala Desa Sabrang terkait kejelasan program kerja, beliau menyatakan bahwa :

“Dari semua rumah yang mendapat bantuan, saya lihat rumahnya semua sudah pada bagus-bagus dan rata-rata juga bangunan rumah batu yang permanen. Bahkan ada yang lebih bagus mungkin karena ditambah dengan dananya sendiri. Kalau masalah perbedaan ketercapaian rumah yang telah dibangun kita tidak bisa katakan bagaimana-bagaimana, dikarenakan dananya lebih tidak mustahil kalau dapat membangun rumah yang bagus. Dan yang terpenting juga dana bantuannya telah didapat dan sudah direalisasikan dengan baik.” {Hasil Wawancara Kepala Desa (Zubaeri Lutfi), 15 Oktober 2020}.

Hal yang sama terkait kejelasan program kerja, kejelasan dari program kerja di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu disampaikan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat :“Mengenai program kerja kita ada laporan yang dilakukan setiap bulannya atau setiap sekian persen dari proses pelaksanaan kegiatan. Jadi kita akan tahu sejauh mana program ini berjalan dan sampai seberapa persen pelaksanaannya.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Edi Sujarwo), 16 Oktober 2020}.

Namun hal berbeda dengan yang dikatakan dengan Tenaga Pendamping Masyarakat Desa Sabrang yang lain, menjelaskan bahwa :

“Kalau menurut saya program kerjanya masih kurang jelas. Karena setelah dana tahap pertama cair akan langsung dibelanjakan dan diberikan kepada penerima bantuan. Setelah itu untuk tahap berikutnya tidak ada pemberitahuan dan kita hanya membuat laporan seadanya saja untuk dilaporkan sebagai tanggung jawab.” {Hasil Wawancara Pendamping Masyarakat (Supriyono), 16 Oktober 2020}.

Terkait kejelasan program kerja, penerima bantuan di Desa Sabrang menjelaskan bahwa :

“Program ini adalah program yang sangat membantu kami. Saya rasa program kerjanya juga sangat jelas karena memang tujuannya adalah membantu mendorong masyarakat menjadikan rumah dan kehidupan kami menjadi lebih baik.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Tumi), 16 Oktober 2020}.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Desa Sabrang beranggapan program ini adalah program yang sangat membantu karena tujuannya jelas untuk mendorong masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik. Penerima di Desa Sabrang pun menyatakan bahwa: “Program ini bagus karena sangat membantu kami. Kami didampingi sampai dana bantuan cair dan bahan bangunan pun datang. Dan setelah itu kita sendiri yang bangun rumah kita masing-masing dibantu tetangga yang lain.” {Hasil Wawancara Warga Penerima Bantuan (Jono), 16 Oktober 2020}.

Hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait program kerja dan kejelasan program kerja yaitu program kerja dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinilai bagus karena program kerja ini jelas setiap langkah agenda kegiatannya. Dalam pelaksanaan program kerja apa yang akan dilaksanakan dirasa jelas karena setiap pelaksanaan akan ada pelaporan sejauh mana program telah dilaksanakan dan sejauh mana pelaksanaannya. Namun kekurangannya masyarakat dibiarkan bekerja sendiri secara swadaya untuk perbaikan rumahnya. Sehingga yang dananya banyak maka hasil rumahnya pun akan bagus dan lebih baik dari yang dana milik sendirinya tidak ada. Akibatnya pembangunan rumah penerima pun menjadi tidak terarah dan yang kurang dananya akan berhenti sendiri sesuai dengan bahan material yang dimiliki.

Dari pembahasan peneliti mengenai kejelasan dari program kerja dari beberapa informan dalam pelaksanaan Program Kerja Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam

pelaksanaan tidak ada kejelasan mengenai program kerjanya. Dapat dikatakan program kerjanya sampai pada tahap pencairan dan bantuan saja. Sementara untuk pembangunan rumahnya tidak ada jadi masyarakat hanya membangun rumah sesuai dengan kemuannya sendiri.

4.3. Analisis Temuan Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas penulis menggunakan teori dari Jones mengenai implementasi kebijakan dengan indikator Pengorganisasian, Interpretasi dan Penerapan. Dari hasil penelitian tersebut penulis akan meringkas pembahasan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Sehingga pembahasan akan dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah yang ditentukan oleh penulis.

1) Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sabrang

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dituliskan diatas, implementasi program tersebut berjalan cukup baik namun belum dapat membuahkan hasil yang maksimal. Program tersebut bisa dikatakan selesai namun klasifikasinya hanya sebatas cukup, tidak buruk namun masih banyak yang harus diperbarui lagi dalam penerapan program tersebut.

Namun secara keseluruhan pelaksanaan program dapat berjalan cukup baik. Implementasi program tersebut tidak hanya terkait rumah yang tidak layak huni. Namun dalam realitanya juga program tersebut dapat membangun MCK umum, sehingga bagi warga yang selama ini melakukan segala kebersihan di sungai sudah terminimalisir dengan adanya pembangunan MCK umum tersebut.

Sesuai dengan hasil penelitian implementasi program BSPS berjalan cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara bahwa pengorganisasian program yang dijalankan sudah sesuai SOP meskipun sebagian dari SOP tidak dapat berjalan secara maksimal hal tersebut merupakan bagian dari kendala yang dapat kita jelaskan pada keterangan selanjutnya. Namun dari keseluruhan SOP tersebut banyak yang terselenggara dengan cukup baik. Selanjutnya komunikasi yang dilakukan antara pelaksana dengan warga penerima bantuan cukup baik

meskipun hal ini juga yang merupakan penyumbang kendala paling besar, namun program tetap dapat berjalan dan terselesaikan walaupun kurang optimal.

Terkait mengenai penerapan prosedur kerja dan kejelasan SOP sudah baik, dari keseluruhan SOP mungkin hanya 10% yang menjadi kendala, dan adanya kendala tersebut bukan berarti SOP tersebut tidak dijalankan. SOP tetap berjalan melainkan tidak maksimal dan ketika SOP tidak dijalankan secara maksimal berarti terdapat kendala pada implementasi program tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas yang mengacu pada hasil penelitian implementasi program BSPS dapat berjalan cukup baik. Jika dilakukan penilaian kesuksesan dari program tersebut mungkin memiliki nilai 75%. Karena memang banyak harus dibenahi dan diperbarui dalam implementasi program tersebut. Untuk kendala dalam implementasi program dapat dijelaskan lebih detail pada pembahasan selanjutnya.

2) Kendala pada saat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sabrang

Kendala pelaksanaan program tersebut yaitu komunikasi antara pelaksana dengan program penerima yang kurang baik. Sehingga menimbulkan interpretasi yang berlebih bagi warga penerima program. Yang menyebabkan warga penerima merasa sedikit kecewa dengan realisasi program tersebut. Warga penerima berfikir bahwa program tersebut turun untuk membangun rumah secara total untuk yang lebih baik. Namun realitanya bantuan tersebut turun berupa material bangunan dan uang untuk ongkos tukang. Tetapi memang pada dasarnya program tersebut hanya bertujuan untuk pemugaran atau renovasi bagi rumah yang tidak layak huni ada pun yang membangun mulai nol, tetapi bantuan material disesuaikan dengan kebutuhan. Dari interpretasi yang berlebih warga penerima tersebut diantaranya juga perlengkapan dan peralatan kerja, mereka menganggap semua akan diterima bersamaan dengan program tersebut, tetapi perlengkapan dan peralatan kerja tersebut menggunakan seadanya milik warga. Yang menjadi kendala selanjutnya yaitu sosialisasi yang kurang merata yang menyebabkan

tenaga pendamping dan warga penerima kurang memahami maksud dan tujuan dari adanya program tersebut.

Bagi tenaga pendamping program BSPS dikerjakan berdasarkan program yang sudah berlalu yang hampir sama. Karena memang tenaga pendamping kurang memahami SOP dari program tersebut. Serta bagi warga penerima hanya sebagian yang dilakukan sosialisasi dan yang tidak memahami tentang program tersebut mereka hanya mengetahui untuk dimintai dokumen administratif bahwa aka nada bantuan. Namun mereka tidak memahami secara jelas program tersebut maksud dan tujuan serta prosedur implementasinya seperti apa, hal tersebut sesuai yang sudah dijelaskan diatas bahwa sebagian sasaran menganggap ada yang tetangganya ada yang kondisi rumahnya hampir sama namun tidak mendapatkan bantuan program tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas yang menjadi kendala yaitu kurangnya intensifnya komunikasi antara pelaksana dengan warga penerima bantuan, andai saja sosialisasi tersebut bisa dilakukan secara maksimal warga penerima bantuan akan memahami maksud dan tujuan program dan tidak menimbulkan interpretasi berlebih bagi warga penerima.

3) Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat penerima Desa Sabrang

Pengaruh program BSPS terhadap masyarakat atau bagi warga penerima bantuan. Dengan implementasi program tersebut masyarakat memiliki respon yang positif atas terealisasinya program. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap warga penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat rasa program kerjanya juga sangat jelas karena memang tujuannya adalah membantu mendorong masyarakat menjadikan rumah dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Desa Sabrang bahwa program tersebut sangat membantu, meskipun program tidak dapat berjalan secara maksimal paling tidak program tersebut sudah meringankan beban masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait mengenai rumah yang layak huni dengan kesejahteraan masyarakat yaitu mengacu pada pendapat Wanda pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa rumah memiliki fungsi yang lebih luas bagi setiap individu atau manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dengan memiliki rumah, secara fisik akan memberikan manfaat terlindunginya individu tersebut dari kondisi cuaca alam seperti panas matahari, hujan, dan serangan hewan yang mengancam nyawa. Kemudian secara mental terpenuhinya kebutuhan rumah akan mengakibatkan individu atau keluarga dapat memberikan rasa nyaman, bisa sebagai sarana beristirahat, dan lebih terfokus dalam melakukan pekerjaan diluar rumah. Sedangkan untuk fungsi sosial rumah menjadi sarana sebagai proses pembinaan keluarga dalam segi jasmani, rohani, pemberian nilai sosial dan pembentukan karakter setiap anggota dalam keluarga.

Dengan rumah yang layak huni paling tidak masyarakat merasa aman dan memiliki ketentraman hati dan bisa berfokus untuk melakukan kegiatan diluar rumah, ketika masyarakat merasa aman dan nyaman mereka akan merasakan ketentraman yang dapat membuat hidup mereka lebih sejahtera.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian pada Bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang belum berjalan dengan optimal. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sabrang

Implementasi program BPSD berjalan cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara bahwa pengorganisasian program yang dijalankan sudah sesuai SOP meskipun sebagian dari SOP tidak dapat berjalan secara maksimal. Jika dilakukan penilaian kesuksesan dari program tersebut mungkin memiliki nilai 75%. Karena memang banyak harus dibenahi dan diperbarui dalam implementasi program tersebut.

2. Kendala pada saat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sabrang

Berdasarkan pembahasan yang menjadi kendala yaitu kurangnya intensifnya komunikasi antara pelaksana dengan warga penerima bantuan, andai saja sosialisasi tersebut bisa dilakukan secara maksimal warga penerima bantuan akan memahami maksud dan tujuan program dan tidak menimbulkan interpretasi berlebih bagi warga penerima.

3. Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat penerima Desa Sabrang

Dampak Implementasi program tersebut masyarakat memiliki respon yang positif atas terealisasinya program. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap warga penerima bantuan. Program tersebut sangat membantu, meskipun program tidak dapat berjalan secara maksimal paling tidak program tersebut sudah meringankan beban masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal yang lebih baik.

5.2.Saran

Berdasarkan dengan apa yang telah peneliti temukan di lapangan selama penelitian, peneliti mempunyai beberapa saran yang mungkin akan bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabrang. Diantaranya :

1. Untuk program selanjutnya usahakan dapat merencanakan program dengan baik supaya dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan sinergitas yang baik dapat mengoptimalkan realisasi program.
2. Untuk program selanjutnya usahakan dapat memilih tenaga yang terampil dan memahami komputer sehingga program berjalan secara lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdul, Syani. 2012. *Sosiologi Sistemika Teori dan Terapan*. Jakarta : Budi Aksara
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial dan kajian pembangunan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amini, Riska. 2019. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. 2013. *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Friedlander ,Walter Ferdinand. 1961. *Introduction To Social Welfare*. New York: Prentice Hall Inc.
- Hariyani, Tuwis. *Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Ekuivalensi Vol.2 No. 2 tahun 2016.
- Jones, Howard. 1990. *Social Welfare in Third World Development*. London : MacMillan.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta:Paradigma
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group
- Midgley, James. 1995. *Social Development: The Developmental Perspective in social welfare*. London : Sage Publications Ltd.
- Moleong, Lexy . 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

- Nawi, Ahmad. Asih Widi Lestari. *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 tahun 2018.
- Qomaria, Afifa. *Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 3, No. 1 tahun 2015.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Ahmad, Mochammad Syawie, *Pemberdayaan Keluarga Miskin Berbasis Komunitas melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi di Desa Jambu Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat)*, Sosiokonsepia Vol.17, No. 03 tahun 2012.
- Wanda, Adhe Setyawan. 2017. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2014*. Jurnal FISIP UNEJ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85801>
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPS
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

LAMPIRAN 1
DAFTAR WARGA PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Dinda Srikanti Fadli	Perempuan	RT03 RW13 Dsn. Krajan
2.	Marjani	Laki-Laki	RT03 RW09 Dsn. Krajan
3.	Asari	Laki-Laki	RT03 RW13 Dsn. Krajan
4.	Senen	Laki-Laki	RT02 RW13 Dsn. Krajan
5.	Jemiran	Laki-Laki	RT03 RW14 Dsn. Krajan
6.	Siadi	Laki-Laki	RT01 RW14 Dsn. Krajan
7.	Salimah	Perempuan	RT03 RW10 Dsn. Krajan
8.	Untung	Laki-Laki	RT01 RW14 Dsn. Krajan
9.	Supriono	Laki-Laki	RT01 RW13 Dsn. Krajan
10.	Suriat	Laki-Laki	RT02 RW13 Dsn. Krajan
11.	Legiyem	Perempuan	RT02 RW12 Dsn. Krajan
12.	Samsul	Laki-Laki	RT01 RW17 Dsn. Krajan
13.	Juri	Laki-Laki	RT02 RW13 Dsn. Krajan
14.	Suwardi	Laki-Laki	RT03 RW12 Dsn. Krajan
15.	Mulyadi	Laki-Laki	RT03 RW13 Dsn. Krajan
16.	Suyatim	Perempuan	RT02 RW13 Dsn. Krajan
17.	Suhartoyo	Laki-Laki	RT02 RW01 Dsn. Kebonsari
18.	Endang Pujiati	Perempuan	RT02 RW04 Dsn. Kebonsari
19.	Andi Sucahyono	Laki-Laki	RT01 RW05 Dsn. Kebonsari
20.	Yuyun Erawati	Perempuan	RT02 RW03 Dsn. Kebonsari
21.	Sukiman	Laki-Laki	RT01 RW04 Dsn. Kebonsari
22.	Sri Handayani	Perempuan	RT02 RW02 Dsn. Kebonsari
23.	Jarkasi	Laki-Laki	RT03 RW06 Dsn. Kebonsari
24.	Siti Rokayah	Perempuan	RT02 RW05 Dsn. Kebonsari
25.	Salamah	Perempuan	RT02 RW02 Dsn. Kebonsari
26.	Wagitam	Laki-Laki	RT02 RW03 Dsn. Kebonsari
27.	Jono	Laki-Laki	RT02 RW18 Dsn. Tegalrejo
28.	Temu	Laki-Laki	RT01 RW18 Dsn. Tegalrejo
29.	Sanusi	Laki-Laki	RT01 RW18 Dsn. Tegalrejo
30.	Somiran	Laki-Laki	RT01 RW19 Dsn. Tegalrejo
31.	Bonadi	Laki-Laki	RT02 RW20 Dsn. Tegalrejo
32.	Badriyah	Perempuan	RT01 RW21 Dsn. Tegalrejo
33.	Siti Maimunah	Perempuan	RT02 RW21 Dsn. Tegalrejo
34.	Sungkono	Laki-Laki	RT01 RW22 Dsn. Tegalrejo
35.	Khoirul Anam	Laki-Laki	RT02 RW22 Dsn. Tegalrejo
36.	Mukhlis Saifudin	Laki-Laki	RT02 RW21 Dsn. Tegalrejo
37.	Satemi	Perempuan	RT02 RW20 Dsn. Tegalrejo
38.	Bambang	Laki-Laki	RT03 RW19 Dsn. Tegalrejo
39.	Sanusi	Laki-Laki	RT01 RW019 Dsn. Tegalrejo

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
40.	Untung	Laki-Laki	RT01 RW19 Dsn. Tegalorejo
41.	Sampir	Laki-Laki	RT02 RW23 Dsn. Jatirejo
42.	Mulyono	Laki-Laki	RT03 RW24 Dsn. Jatirejo
43.	Nuryanto	Laki-Laki	RT01 RW23 Dsn. Jatirejo
44.	Paini	Perempuan	RT02 RW24 Dsn. Jatirejo
45.	Bejo	Laki-Laki	RT02 RW23 Dsn. Jatirejo
46.	Tumi	Perempuan	RT06 RW24 Dsn. Jatirejo
47.	Tukiman	Laki-Laki	RT03 RW23 Dsn. Jatirejo
48.	Misirah	Laki-Laki	RT02 RW24 Dsn. Jatirejo
49.	Kodimen	Laki-Laki	RT01 RW23 Dsn. Jatirejo
50.	Sunarto	Laki-Laki	RT01 RW23 Dsn. Jatirejo

LAMPIRAN 2
Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ketua Pelaksana



Wawancara dengan Tenaga Pendamping Masyarakat



Wawancara dengan Penerima Bantuan



Foto Tampak Rumah Hasil Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

LAMPIRAN 3

Surat Ijin Penelitian


YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA "PEMBANGUNAN" JEMBER
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
 SK. MENDIKRITV. NOMOR: 0468/O/1987
 Jl. Tauba - Tomba No. 9 Telp/Fax. (0331) 486182, 424206 Jember
 Laman web: stiapem.jember.ac.id Email: stia.pembangunan@jember.ac.id

Nomor : 026/STIA.P.Jbr/BPPM/IX/2020
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Penelitian Mahasiswa

Kepada : Kepala Desa Sabrang
 Yth. : Jln. Watu Ulo No. 5A Sabrang, Kecamatan Ambulu
 Kabupaten Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yaitu pembuatan skripsi maka kami mengajukan permohonan ijin penelitian bagi mahasiswa STIA Pembangunan Jember.

Adapun mahasiswa tersebut adalah:

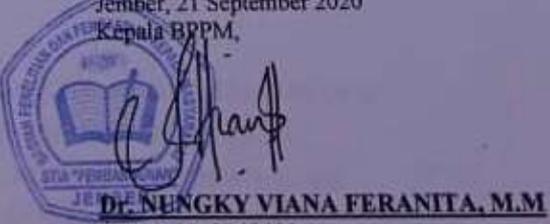
Nama	: Siti Rofiqoh
NPM	: 1658632012003
No. HP	: 082234677800
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Semester	: IX (sembilan)
Judul Proposal	: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
 Kepala STIA Pembangunan Jember

Jember, 21 September 2020
 Kepala BPPM,


Ir. HENDRI SUPARTO, M.Si
 NIP. 195507131986011002


Dr. NUNGKY VIANA FERANITA, M.M
 NIDN. 0713048401